



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KONDAWE KEPULAUAN TAHUN 2024



RIFQI SAIFULLAH RAZAK , ST
BUPATI KONDAWE KEPULAUAN

MUHAMAD FARID, SE
WAKIL BUPATI KONDAWE KEPULAUAN

**KONDAWE KEPULAUAN
TAHUN 2025**

WAWONII LANGAI

KONDAWE KEPULAUAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024

**KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2025**



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bimbingannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa LPPD Kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Konawe Kepulauan kurun waktu satu tahun 2024, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kami berharap laporan ini juga dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga sebagai media transparansi atas pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan.

Akhirnya pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LPPD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024. Semoga LPPD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran komprehensif atas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Langara, 24 Maret 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN





DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	42
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	49

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro.....	58
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	58
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	73

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	112
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	112
3.3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan.....	113
3.4. Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan	117
3.5. Saran dan Tindak Lanjut Tugas Pembantuan.	117

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan.....	118
4.2. Urusan Kesehatan	124
4.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	141
4.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	146
4.5. Urusan Trantibumlinmas	151
4.6. Urusan Sosial	162
4.7. Program dan Kegiatan	173

BAB V PENUTUP

Penutup	196
---------------	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Letak Geografis Kabupaten Konawe Kepulauan	3
Gambar 1.2. Lokasi Pertambangan Logam.....	7
Gambar 1.3: Peta Pertambangan Non Logam	7
Gambar 1.4: Air Terjun Tumburano	7
Gambar 1.5: Air Terjun Kopea	8
Gambar 1.6: Sungai Mosolo	9
Gambar 1.7: Laa Wawonii	9
Gambar 1.8: Pantai Tengkera	10
Gambar 1.9: Pantai Sawaea	10
Gambar 1.10: Pantai Polara	11
Gambar 1.11: Pantai Kampa	11
Gambar 1.12: Terumbu Karang	12
Gambar 1.13: Ikan Duyung	12
Gambar 1.14: Benteng Watuntinapi	13
Gambar 1.15: Kontara (Benteng Pertahanan).....	13
Gambar 1.16: Makam Raja Mbeoga	14
Gambar 1.17: Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023	18
Gambar 1.18: Keterkaitan Permasalahan Utama dengan permasalahan Pokok Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026	43



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2011 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 20).

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii) merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelantikan Pejabat Bupati pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Konawe dan berada dalam gugusan Pulau-Pulau di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Pulau Buton dan Kota Kendari. Wilayahnya di posisi sangat strategis karena perairan lautnya di lalui oleh jalur pelayaran kawasan timur dan barat indonesia, berada pada kawasan yang



sangat potensial yakni diapit oleh Laut Banda dan Selat Wawonii yang memiliki potensi sumberdaya keragaman hayati kelautan dan perikanan cukup besar.

Kabupaten Konawe Kepulauan secara geografis terletak diantara $03^{\circ}68'$ melintang dari Utara ke Selatan dan $04^{\circ}16'$ Lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur $122^{\circ}56'$ dan $123^{\circ}16'$ Bujur Timur, secara geografis Kabupaten Konawe Kepulauan terletak pada bagian selatan Khatulistiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Wawonii,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Wawonii.

Gambar 1.1 :

Letak Geografis Kabupaten Konawe Kepulauan



Sumber : RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

2. Topografis

Topografis wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan pada umumnya merupakan dataran rendah, bergelombang hingga berbukit. Sedangkan wilayah yang tergolong pegunungan sangat terbatas. Dengan ketinggian antara 0 - 1.000 m di atas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 50 - 1.000 m diatas permukaan laut merupakan daerah perbukitan sampai pegunungan dengan kelerengan antara 0 – 40% di bagian Tenggara, Utara dan Timur Laut Konawe Kepulauan.

Secara Geografis Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada posisi strategis karena perairan lautnya dilalui jalur perairan nasional kawasan timur dan barat, wilayah darat Kabupaten Konawe Kepulauan diapit oleh Laut Banda dan Selat Wawonii yang memiliki keragaman sumberdaya alam hayati yang cukup besar.



Seperi daerah-daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Konawe Kepulauan dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan musim banyak di pengaruhi oleh arus angin yang bertiup di atas wilayah. Pada bulan November sampai dengan Maret, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik, setelah sebelumnya melewati beberapa lautan. Pada bulan-bulan tersebut terjadi musim penghujan.

Sekitar bulan April, arus angin selalu tidak menentu dengan curah hujan kadang-kadang kurang dan kadang-kadang lebih. Musim ini oleh para pelaut sempat dikenal sebagai musim Pancaroba. Sedangkan pada bulan Mey sampai dengan Agustus, angin bertiup dari arah timur yang berasal dari Benua Australia kurang mengandung uap air. Hal tersebut mengakibatkan minimnya curah hujan di daerah ini. Pada bulan Agustus sampai dengan Oktober terjadi musim kemarau. Sebagai akibat perubahan kondisi alam yang sering tidak menentu, keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki sungai yang relative besar, antara lain adalah Sungai Lampeapi, Sungai Lansilowo, Sungai Ladianta dan Sungai Wungkolo serta beberapa sungai dan anak sungai lainnya. Kondisi sungai-sungai tersebut sangat memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan potensinya.

Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti kepiting bakau dan udang. Selain itu, wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii banyak ditemukan padang lamun dan terumbu karang. Persentase keberadaan hutan mangrove di Pulau Wawonii rata-rata sebesar 33,35%, padang lamun sebesar 30,66% dan terumbu karang rata-rata sebesar 25,81%.

3. Potensi Unggulan Daerah

Meski Pulau Wawonii tergolong Pulau kecil yang berada di Wilayah Timur Sulawesi Tenggara (Sultra) namun kaya akan potensi, terutama pengembangan sector perikanan dan pariwisata. Dikelilingi dengan perairan laut banda tentunya memiliki kawasan laut yang cukup luas serta hamparan pantai (Pasir Putih) yang eksotik yang tidak kalah menariknya dengan pantai yang ada di Indonesia bahkan Mancanegara Seperti pantai Kuta Bali, Indonesia dan pantai Okinawa Jepang.

Secara spasial (keruangan) Kabupaten Konawe Kepulauan atau Pulau Wawonii memiliki keunggulan strategis selain dekat dengan Kota Kendari sebagai Ibu Kota Provinsi



Sulawesi Tenggara (Sultra) kawasan laut Pulau Wawonii bagian Selatan dan Tenggara merupakan pertemuan tiga selat yakni; Selat Wawonii, Selat Buton dan laut Banda, sehingga memiliki keistimewaan khusus karena bertepatan dengan pertemuan tiga arus laut yang jarang di temukan di daerah manapun, dengan demikian potensi perikanan sangat besar sehingga sangat layak untuk pembuatan pelabuhan perikanan terpadu di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Disamping itu pulau Wawonii sangat berpotensi dijadikan sebagai titik terbaik (Based Poin Part) dalam pembangunan industry perikanan terpadu juga dipersiapkan sebagai alur persinggahan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Tentunya kawasan ini layak untuk pembangunan pelabuhan peti kemas yang berskala besar terutama di Sawaea Kecamatan Wawonii Selatan.

Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti kepiting bakau dan udang. Selain itu, wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii banyak ditemukan padang lamun dan terumbu karang. Persentase keberadaan hutan mangrove di Pulau Wawonii rata-rata sebesar 33,35%, padang lamun sebesar 30,66% dan terumbu karang rata-rata sebesar 25,81%.

Kabupaten Konawe Kepulauan juga memiliki sungai yang relative besar, antara lain adalah Sungai Lampeapi, Sungai Lansilowo, Sungai Ladianta dan Sungai Wungkolo serta beberapa sungai dan anak sungai lainnya. Kondisi sungai-sungai tersebut sangat memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan potensinya.

Dari hasil identifikasi potensi pemetaan wilayah darat dan laut konawe kepulauan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Karena memiliki potensi kemaritiman yang cukup luas untuk pembangunan industry perikanan pelabuhan regional dan pada daerah pesisir keliling pulau wawonii pantainya menjadi potensi pariwisata. Selain potensi diatas pulau Wawonii juga memiliki potensi pertambangan yakni pertambangan logam dan pertambangan non logam.

a. Perikanan

Potensi perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas dua jenis yakni perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2023 total tangkapan nelayan sebanyak 8.457 Ton dan nilai produksi sebesar Rp. 181.479.904.201. perikanan budi daya juga merupakan potensi unggulan kabupaten Konawe Kepulauan. Budidaya Air Payau, tersebar di Kec. Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, Wawoni Timur Laut dan Wawonii Utara dengan luas sekitar 400 hektar. Jenis Budidaya berupa kepiting, udang, Lobster air tawar/Payau dan ikan



bandeng. Disamping itu juga dikembangkan budi daya perikanan air laut dalam bentuk karamba. Di beberapa kecamatan di tumbuh tanaman mangrove dan panorama bawah lautnya terdapat terumbu karang yang sangat indah dimana di sekelilingnya di tumbuh lamun tempat ikan duyung (dugong) berkembang biak sejak lama.

b. Pertanian

Bidang Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki areal persawahan yang cukup luas serta tanam janjangka panjang dan jangka pendek. Di bidang perkebunan komoditi unggalannya antara lain: Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, pala dll. Bidang Kehutanan pulau wawonii masih terdapat paru-parubumi yang masih perawan, terdapat pula 23 sungai dan 10 air terjun yang ketinggiannya mencapai ± 120 m dimana debit airnya sangat keras, sangat cocok untuk digunakan sebagai sumber energi (pembangkit listrik tenaga makro, mikro hidro (PLTMH)). Kemudian di tengah-tengah gunung waworete (Pulau Wawonii) terdapat danau yang cukup besar dan di sekitarnya terdapat danau kecil yang sangat panas.

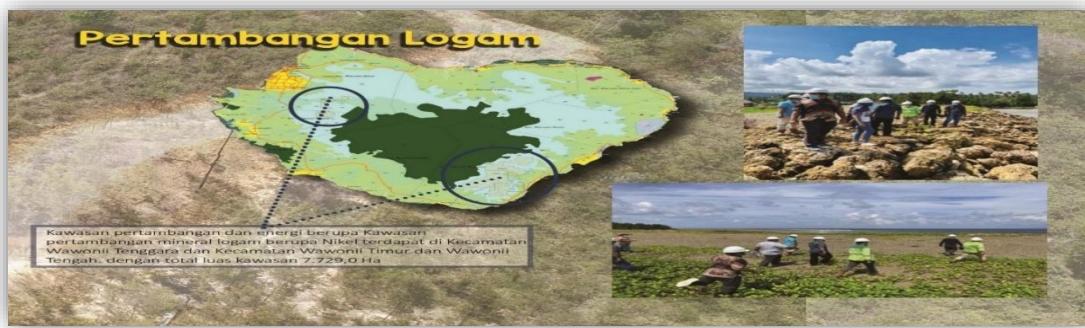
Potensi tanaman pangan Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan dan. Pertanian tanaman pangan tersebar diseluruh kecamatan dengan luas 4599 hektar. Jenis komoditi unggulan tanaman pangan adalah Padi, Jagung, Keladi dan Ubi Kayu. Wilayah perkebunan kabupaten Konawe Kepulauan tersebar diseluruh kecamatan dengan luas sebesar 17.059 hektar dengan jenis komoditi unggulan meliputi kelapa, pala, jambu mette, kakao, dan cengkeh.

c. Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Konawe Kepulauan juga tidak kalah saing dengan sektor-sektor unggulan lainnya. Komoditi unggulan peternakan Kabupaten Konawe Kepulauan adalah peternakan sapi, peternakan kambing, ayam petelor, ayam buras, ayam potong serta peternakan itik/manila.

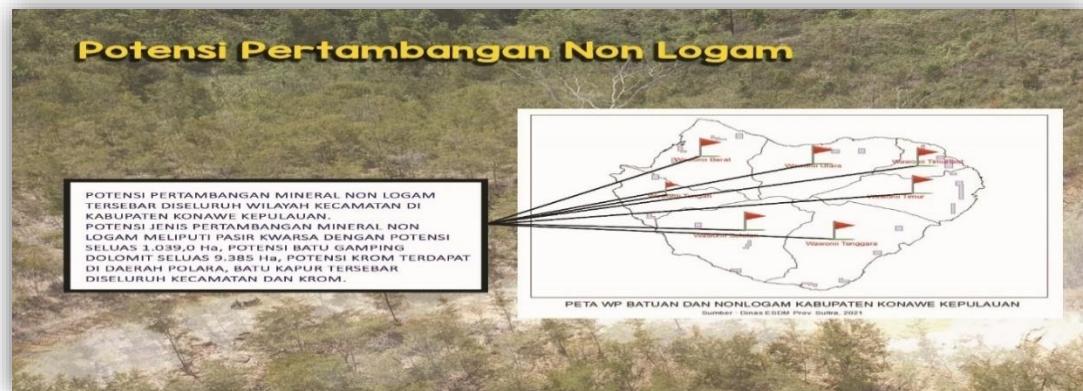
d. Potensi Pertambangan.

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan. Potensi pertambangan Kabupaten Konawe Kepulauan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi pertambangan Logam dan Pertambangan non logam. Pertambangan logam yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah berupa nikel yang terdapat di kecamatan Wawonii Tenggara dan Wawonii Tengah dengan total luas Kawasan 7.729,0 Ha.



Gambar 1.2 : Lokasi Pertambangan Logam

Potensi pertambangan Mineral Non logam tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Jenis potensi pertambangan Non Logam yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah meliputi pasir kwarsa yang terdapat di wilayah kecamatan Wawonii Tengah dengan potensi seluas 1.039,0 Ha, Potensi batu gamping Dolomit seluas 9.385 Ha, potensi Krom terdapat di Daerah Polara dan potensi batu kapur yang tersebar di semua wilayah kecamatan.



Gambar 1. 3 : Peta Pertambangan Non Logam

e. Potensi Wisata

Saat ini telah ditemukan empat titik lokasi air terjun dan sungai yang berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata maupun sebagai sumber energi kelistrikan yakni:

1. Air terjun Tumburano



Gambar 1. 4 : Air Terjun Tumburano



Air Terjun ini adalah air terjun tertinggi dan terbesar di kecamatan wawonii utara, air terjun tumburano ini diperkirakan memiliki ketinggian 120 meter dengan tiga undapan air air terjun besar dan beberapa undapan kecil. Air terjun Tumburano sangat unik karena air merayapi dinding batuan sedimen raksasa kecoklatan yang terbentuk seperti sebuah atap rumah adat. Batuan hasil pelarutan berjuta tahun ini bahkan berongga di bagian belakangnya sehingga tampak seperti gua menggantung. Guyuran airnya bahkan bisa membuat kolam besar dibawahnya dan juga menciptakan kabut.

Air terjun tumburano ini terletak di Desa Lansilowo Kecamatan Wawonii Utara yang berjarak ± 20 Km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Air Terjun Kopea



Gambar 1.5 : Air Terjun Kopea

Berada ± 33 Km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan tepatnya di desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan dengan ketinggian ± 30 m. Air terjun ini merupakan hulu Sungai Roko-roko, yang di observasi oleh Pemda Konawe Kepulauan (Bappeda dan PM) berdasarkan informasi masyarakat desa lawey pada tanggal 23 September 2014, air terjun ini sangat berpotensi dimanfaatkan sebagai objek wisata dan pengembangan PLTA/PLTMH.

3. Air Terjun Laantambaga

Air terjun ini terletak di Hulu sungai Lampeapi Kecamatan Wawonii Tengah dengan ketinggian ± 30 m. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ± 10 Km. Air terjun ini juga berpotensi dijadikan sebagai objek wisata. Rencananya air terjun Laantambaga akan dijadikan sebagai pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan sudah dilakukan survei awal oleh Institute Teknologi Bandung (ITB) pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan kekuatan listrik ± 0,7 Mega Watt.

4. Air terjun Lanuku

Berada di Desa Wawouso Kecamatan Wawonii Selatan dengan ketinggian ± 20 m. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ± 31 Km, air terjun ini sangat berpotensi dijadikan sebagai



objek wisata. Di hari-hari tertentu Air terjun ini sangat ramai di kunjungi masyarakat setempat/desa-desa tetangga, seperti saat tahun baru (masehi) dan lebaran (Idul Fitri).

5. Ringkulele

Berada di Langara Kecamatan Wawonii Barat, air terjun ini hanya digunakan untuk tempat rekreasi masyarakat saat hari-hari tertentu, seperti Idhul Fitri dan Tahun Baru masehi.

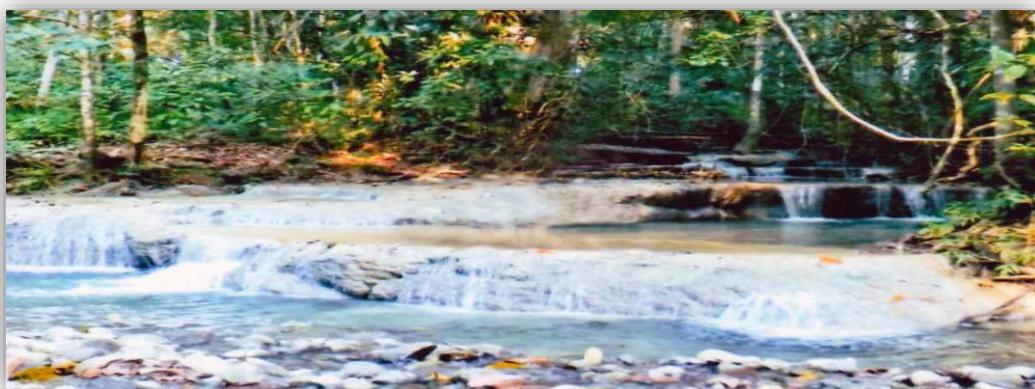
6. Sungai Mosolo



Gambar 1.6 : Sungai Mosolo

Daerah Aliran Sungai (DAS) ini terletak di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara, memiliki air yang sangat jernih sangat berpotensi dijadikan sebagai pusat pengembangan air minum mineral. Yang lebih mengherankan lagi di titik pertemuan antara aliran sungai dengan air laut itu masih terasa tawar.

7. Laa Wawonii



Gambar 1.7 : Laa Wawonii

Terletak di hulu sungai Wawonii (Desa Ladianta Kecamatan Wawonii Timur Laut) dengan jarak ± 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Tepatnya di sebalah Istana Jin (Perkampungan Lakino Wawonii).

Selain beberapa potensi wisata alam (air terjun) yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan (pulau Wawonii), Pulau Wawonii juga memiliki banyak Potensi Wisata pantai,



panorama alam bawah laut dan Cagar Budaya yang tak kalah menariknya dengan yang ada di Indonesia bahkan Manca Negara sekalipun seperti :

1. Pantai Tengkera



Gambar 1.8 : Pantai Tengkera

Pantai yang terletak di Desa Nambo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara dengan jarak ± 50 Km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan juga banyak menawarkan hamparan pasirputih dan wisata alam bawah laut yang indah, sangat cocok untuk dijadikan sebagai objek wisata alam bahari.

2. Pantai Sawaea



Gambar 1.9 : Sawaea

Terletak di Desa Sawaea Kecamatan Wawonii Selatan dengan jarak ± 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Menawarkan panorama hamparan pasir yang eksotik tentunya tak kalah indahnya dengan pantai Kuta Bali. Pantai ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata Nasional maupun Internasional.



3. Pantai Polara



Gambar 1. 10 : Pantai Polara

Pantai ini berada di Desa Polara Kecamatan Wawonii Tenggara dengan jarak ± 50 Km dari Ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan (Wawonii) memiliki panjang ± 2 Km, menawarkan keindahan yang tak kalah menariknya dengan pantai yang ada di Okinawa Jepang, juga sangat cocok bagi wisatawan yang gemar berselancar.

4. Pantai Kampa



Gambar 1. 11 : Pantai Kampa

Pantai ini Terletak di Desa Wawobili Kecamatan Wawonii Barat dengan jarak ± 7 Km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii) sehingga mudah diakses oleh wisatawan local maupun wisatawan manca negara dengan menawarkan panorama indahnya hamparan pasirputih dan panorama alam bawah laut yang mempesona sehingga sangat cocok untuk menghabiskan suasana liburan di tempat ini bersama keluarga.



5. Terumbu Karang



Gambar 1. 12: Terumbu karang

Sesuai hasil survei Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Bappeda dan PM), bahwa di sepanjang Pesisir Pulau Wawonii ditemukan potensi unggulan bawah laut yaitu terumbukarang yang luas dan sangat indah, sehingga pesisir pulau wawonii juga menawarkan objek diving dan snorkeling bagi wisata lokal dan mancanegara.

6. Dugong (Ikan Duyung)



Gambar 1. 13 : Ikan Duyung

Hidup di Pesisir Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi Kecamatan Wawonii Barat, Tenggara, Timur dan Timur Laut. Dugong (ikan duyung) adalah salah satu tujuan wisata bawah laut di Pulau Wawonii karena menurut hasil survei Universitas Hasanuddin Makassar bahwa dugong hidup dan berkembangbiak di pesisir pulau wawonii.

e. Potensi Cagar Budaya

Dibidang seni dan Budaya Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat kekayaan sejarah peradaban pemukiman para raja-raja wawonii yang disebut Lakino, benteng-benteng bersejarah, makam raja, tari lense, tari molahi, dan situs-situs bersejarah yang terdapat di



dalamgua. Dan keseluruhan pelosok Kabupaten Konawe Kepulauan adalah pegunungan dan pesisir yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata lokal dan mancanegara.

1. Benteng/kerajaan Watuntinapi (Batu Disusun)



Gambar 1. 14: Benteng/Kerajaan Watuntinapi

Terletak di Sekitar Desa ladianta, Noko dan Mataburanga Kecamatan Wawonii Timur Laut dengan jarak \pm 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas area Watuntinapi \pm 2 Km². Sesuai dengan namanya, bangunan bersejarah ini disusun menggunakan batu-batu pipih. Bangunan ini merupakan peninggalan Raja Mbeoga (Lakino Wawonii Ke-VIII).

2. Kontara (Benteng Pertahanan)



Gambar 1. 15 : Kontara (BentengPertahanan)

Terletak di sekitar desa Ladianta, Noko dan Mataburanga Kecamatan Wawonii Timur Laut dengan jarak \pm 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas areal bangunan ini \pm 1 Ha. Sesuai dengan namanya bangunan ini di dirikan sebagai benteng pertahanan untuk mengintai musuh baik dari penjajah bangs abelanda maupun para perompak (BangsaTobelo) dan kerajaan-kerajaan lain. Keunikan dari bangunan ini adalah bentuk pintu masuknya seperti pulau wawonii.



3. Makam Raja Mbeoga



Gambar 1. 16: Makam Raja Mbeoga

Berada di Desa Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut, makam ini adalah salah satu peninggalan sejarah Pulau Wawonii yang di lestarikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu cagar budaya Kabupaten Konawe Kepulauan (pulau wawonii).

Adapun potensi lain yang di unggulkan di pulau wawonii yakni areal persawahannya yang cukup luas yang berkisar \pm 40.000 Ha, dan saat ini yang sudah dapat diolah oleh masyarakat seluas \pm 8.000 Ha (sumber : PDRB Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2013), hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai (masyarakat masih menggunakan alat-alat tradisional).

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan Data Agregat kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel: 1.1 Jumlah Penduduk Perkecamatan



Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Konkep 2024

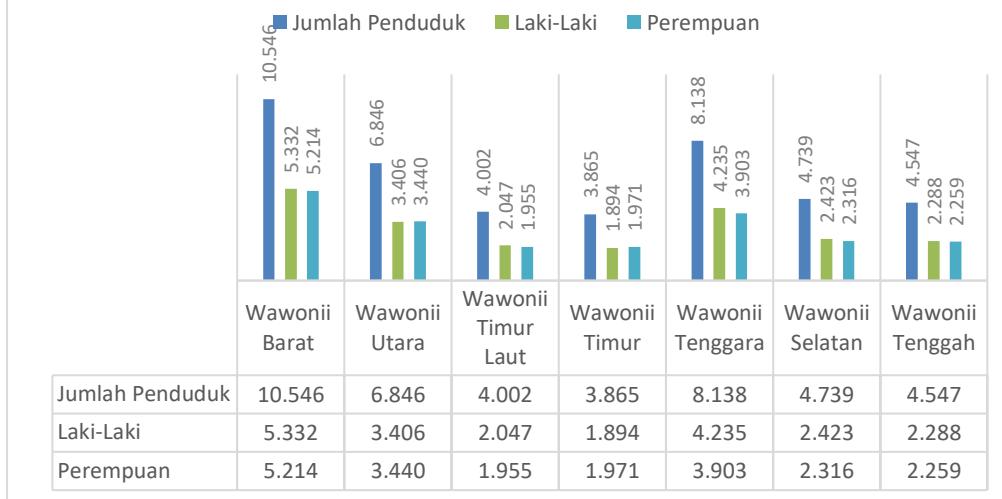
Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Wawonii Barat dengan jumlah penduduk sebesar 10.546 jiwa disusul kecamatan Wawonii Tenggara dengan jumlah penduduk sebesar 8.138 Jiwa. Wawonii Utara berada pada posisi ke tiga dengan jumlah penduduk 6.846 Jiwa. Wawonii Selatan berada pada posisi ke empat dengan jumlah penduduk sebesar 4.739 jiwa. Wawonii Tengah berada pada posisi kelima dengan jumlah penduduk sebesar 4.547 jiwa. Wawonii Timur Laut berada pada posisi keenam dengan jumlah penduduk 4.002 Jiwa dan Wawonii Timur berada pada posisi ketujuh atau terakhir dengan jumlah penduduk sebesar 3.865 jiwa. Jika di total secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 berjumlah 42.683 Jiwa.

Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:



Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Suber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Konkep 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada pada kecamatan Wawonii Barat sebanyak 5.332 Jiwa dan jumlah penduduk penduduk perempuan terbanyak juga berada pada kecamatan Wawonii Barat berjumlah 5214 jiwa dengan jumlah penduduk sebanyak 10.546 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki paling sedikit berada pada kecamatan Wawonii Timur yakni berjumlah 1.894 jiwa begitupun juga jumlah penduduk Perempuan paling sedikit juga berada di kecamatan Wawonii Timur yakni berjumlah 1.971 jiwa dan jika di total secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan di kecamatan Wawonii Timur berjumlah 3.865 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Kepulauan

Luas Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 867,58 km² (merupakan angka tentatif). Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi 7 Kecamatan, 89 Desa dan 7 Kelurahan dengan sebaran sebagai berikut :



**Tabel 1.3 Jumlah Desa/Kelurahan Pada Masing-masing Kecamatan
Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Banyaknya		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Wawonii Barat	Langara	15	1	16
2.	Wawonii Selatan	Sawaea	10	1	11
3.	Wawonii Utara	Lansilowo	20	1	21
4.	Wawonii Tengah	Lampeapi	11	1	12
5.	Wawonii Timur	Munse	10	1	11
6.	Wawonii Timur Laut	Ladianta	9	1	10
7.	Wawonii Tenggara	Mosolo	14	1	15
Jumlah			89	7	96

Pada Tabel 1.3 di atas, tampak bahwa dari seluruh kecamatan yang ada, Kecamatan Wawonii Utara merupakan kecamatan yang memiliki banyak Desa yakni berjumlah 20 Desa sedangkan untuk kelurahan masing-masing Desa memiliki 1 kelurahan.

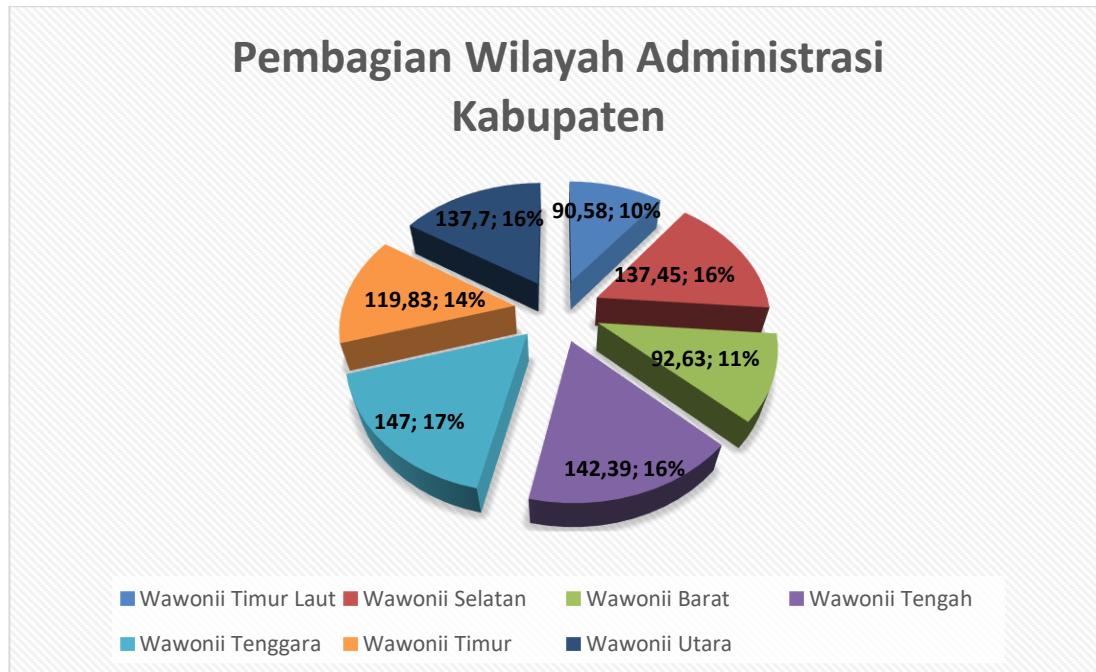
Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki Luas 867,58 km² (merupakan angka tentatif). Dari luas tersebut dibagi didalam 7 kecamatan dengan Luas perkecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Wawonii Barat Seluas 92,63 km²
2. Kecamatan Wawonii Utara Seluas 137,70 km²
3. Kecamatan Wawonii Timur Laut Seluas 90,58 km²
4. Kecamatan Wawonii Timur Seluas 119,83 km²
5. Kecamatan Wawonii Tenggara seluas 147,00 km²
6. Kecamatan Wawonii Selatan seluas 137,45 km²
7. Kecamatan Wawonii Tengah seluas 142,39 km²

Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 1.17: Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024



Sumber Data : Konawe Kepulauan Dalam Angka Tahun 2025

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Lembaran daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor 11 tahun 2020. Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 28 Dinas/Kantor/Badan dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 1.4 : Rincian Perangkat Daerah dan Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
2	Dinas Kesehatan	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
3	Dinas Pu-Tr	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020



No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
5	Dinas Satpol PP	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
6	Dinas Sosial	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
8	Dinas PPKBP3A	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
9	Dinas Ketahanan Pangan	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
11	Dinas Lingkungan Hidup	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
12	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
14	Dinas Perhubungan	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
15	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
19	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
20	Dinas Pertanian	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
21	Badan Keuangan Daerah	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
22	BAPPEDA	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
23	BKPSDM	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
24	INSPEKTORAT	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
25	UKBPJ	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
26	BPBD	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
27	Sekretariat DPR	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020
28	Rumah Sakit Umum Daerah	Perda Kab. Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020



f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah

Total Jumlah Pegawai pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 berjumlah 505 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah secara keseluruhan pegawai dengan kualifikasi keilmuan sarjana (Strata s1) dan Magister (Strata S2) berjumlah 474 orang. Sedangkan jumlah pegawai dengan kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) kebawah berjumlah 31 orang. Jumlah Pegawai Fungsional bersertifikat Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah 14 Orang dan jumlah seluruh pegawai fungsional Kabupaten Konawe. Aparatur Sipil Negara tersebut tersebar di seluruh perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5 : Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	0	0	5
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	11	4	2	17
3	Dinas Kesehatan	Kesehatan	18	0	20	38
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan pekerjaan umum	10	3	41	54
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Urusan Perumahan	4	3	6	
6	Dinas Satpol PP	Urusan Ketertiban umum	8	0	5	13
7	Dinas Sosial	Urusan Sosial	3	2	0	5
8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi	6	0	3	9
9	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan	Urusan keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	8	4	3	15



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
	Perlindungan Anak					
10	Dinas Ketahanan Pangan	Urusan Ketahanan Pangan	5	1	2	8
11	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan lingkungan hidup	7	1	3	11
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	0	7	10
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	1	6	19
14	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	11	0	5	16
15	Dinas Kominfo Statistik Dan Persandian	Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian	5	1	4	10
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah	Urusan Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6	0	3	9
17	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	Urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6	0	4	10
18	Dinas Perikanan Dan Kelautan	Urusan Perikanan dan Kelautan	7	2	3	12
19	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah	5	4	2	11
20	Dinas Pertanian	Urusan Pertanian	6	3	2	11
21	NSPEKTORAT	Fungsi Penunjang Pengawasan	7	9	2	18
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	6	0	7	13
23	Badan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	16	2	2	20



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
24	Badan Kepegawaian Dan Pembangunan Sumberdaya Manusia	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	6	0	4	10
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	6	0	0	6
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	0	0	5
27	Sekretariat DPR	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	0	6	11
28	Bagian Umum	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	1	8	10
29	Bagian Pemerintahan		1	1	3	5
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	3	1	5
31	Bagian Organisasi Kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	3	1	5
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	1	1	3
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	2	2	5
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	1	1	4
35	Bagian Hukum	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	5	6
36	Bagian Perekonomian dan SDA	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	2	3
37	RSUD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	0	6	9
38	Kecamatan Wawonii Barat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	7	0	1	8



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
39	Kecamatan Wawonii Utara	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	8	0	0	8
40	Kecamatan Wawonii Timur Laut	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	6	0	0	6
41	Kecamatan Wawonii Timur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	4	0	1	5
42	Kecamatan Wawonii Tenggara	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	7	0	3	10
43	Kecamatan Wawonii Selatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	0	2	7
44	Kecamatan Wawonii Tengah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	0	3	8

Sumber : BKPSDM Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025

g. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 646.486.163.577,00** dan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 sebesar **Rp. 643.584.808.175,00 dengan** persentase 99,55 %. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 706.370.894.989** dan realisasi anggaran Belanja Daerah pada tahun 2024 sebesar **Rp. 674.378.235.228,00** dengan persentase 95,47 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 1.6: Realisasi Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	646.486.163.577,00	643.584.808.175,00	99,55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.249.032.486,00	17.270.284.356,00	100,12
4.1.01	Pajak Daerah	3.640.000.000,00	4.396.468.604,00	120,78
4.1.01.06	Pajak Hotel	15.000.000,00	11.099.091,00	73,99
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	15.000.000,00	11.099.091,00	73,99
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.886.690.730,00	157,22
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000,00	1.886.690.730,00	157,22
4.1.01.09	Pajak Reklame	15.000.000,00	21.469.513,00	143,13
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.000.000,00	21.469.513,00	143,13
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.000.000.000,00	943.175.159,00	94,32
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.000.000.000,00	943.175.159,00	94,32
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000,00	1.141.903.387,00	126,88
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	900.000.000,00	1.141.903.387,00	126,88
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	500.000.000,00	388.141.124,00	77,63
4.1.01.15.01	PBBP2	500.000.000,00	388.141.124,00	77,63
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00	3.989.600,00	39,90
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000,00	3.989.600,00	79,79
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.340.000.000,00	3.107.599.652,00	93,04
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.115.000.000,00	1.907.129.732,00	90,17
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.100.000.000,00	1.888.159.732,00	89,91
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.000.000,00	18.970.000,00	126,47
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.225.000.000,00	1.200.469.920,00	98,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	800.000.000,00	685.182.000,00	85,65



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	20.000.000,00	14.644.500,00	73,22
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	3.950.000,00	79,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	70.000.000,00	60.655.000,00	86,65
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	19.591.000,00	65,30
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	300.000.000,00	416.447.420,00	138,82
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	100,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.912.943.999,00	5.410.127.613,00	91,50
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	136.109.200,00	272,22
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	136.109.200,00	272,22
4.1.04.05	Jasa Giro	1.020.000.000,00	604.283.651,00	59,24
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	593.665.713,00	59,37
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	10.617.938,00	53,09
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	1.907.191.769,00	100,38
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.900.000.000,00	1.907.191.769,00	100,38
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	485.102.628,00	97,02
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	485.102.628,00	97,02
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	62.995.131,00	12,60
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	62.995.131,00	12,60
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	7.957.154,00	79,57
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	27.000,00	2,70
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.000.000,00	16.020,00	1,60
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	3.147.961,00	62,96



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000,00	4.766.173,00	476,62
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.931.943.999,00	2.206.488.080,00	114,21
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	427.715.660,00	85,54
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	112.000.000,00	242.973.005,00	216,94
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.000.000,00	10.603.482,00	70,69
4.1.04.15.11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	710.033.676,00	991.683.000,00	139,67
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	551.000.000,00	499.602.610,00	90,67
4.1.04.15.76	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	33.910.323,00	33.910.323,00	100,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.249.032.486,00	17.270.284.356,00	100,12
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	626.919.157.091,00	624.390.779.080,00	99,60
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	607.094.396.000,00	608.499.872.023,00	100,23
4.2.01.01	Dana Perimbangan	529.867.056.000,00	531.272.532.023,00	100,27
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85.856.894.000,00	87.204.773.480,00	101,57
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	330.150.530.000,00	331.828.914.827,00	100,51
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.917.626.000,00	78.102.010.197,00	98,97
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	34.942.006.000,00	34.136.833.519,00	97,70
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	529.867.056.000,00	531.272.532.023,00	100,27



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
4.2.01.05	Dana Desa	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	100,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.314.714.000,00	11.314.714.000,00	100,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	11.314.714.000,00	11.314.714.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	77.227.340.000,00	77.227.340.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	80,16
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	80,16
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	80,16
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	80,16
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	626.919.157.091,00	624.390.779.080,00	99,60
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99
	JUMLAH PENDAPATAN	646.486.163.577,00	643.584.808.175,00	99,55
5	BELANJA DAERAH	706.370.894.989,00	674.378.235.228,00	95,47
5.1	BELANJA OPERASI	389.285.857.099,00	368.651.472.619,00	94,70
5.1.01	Belanja Pegawai	153.100.700.515,00	146.544.208.655,00	95,72
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	117.236.633.344,00	112.126.922.636,00	95,64
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	87.171.894.872,00	84.178.531.805,00	96,57
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.813.239.086,00	7.519.413.476,00	96,24
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.227.620.000,00	4.067.975.000,00	96,22
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.405.705.000,00	3.286.844.000,00	96,51



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.885.726.965,00	1.801.010.000,00	95,51
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.007.874.648,00	4.804.356.680,00	95,94
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	267.631.928,00	230.474.930,00	86,12
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.415.615,00	1.326.054,00	54,90
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.712.732.392,00	5.550.872.051,00	82,69
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	196.854.899,00	171.529.376,00	87,13
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	544.937.939,00	514.589.264,00	94,43
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.443.304.822,00	9.251.847.152,00	97,97
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.095.304.822,00	8.903.847.152,00	97,89
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	348.000.000,00	348.000.000,00	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.285.159.349,00	17.165.366.101,00	93,88
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	10.852.856.697,00	10.010.858.800,00	92,24
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.026.300.000,00	1.026.000.000,00	99,97
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	798.674.600,00	782.137.301,00	97,93
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.607.328.052,00	5.346.370.000,00	95,35
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.565.500.000,00	7.517.157.696,00	99,36
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	454.000.000,00	451.290.000,00	99,40
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.000.000,00	35.632.300,00	91,36
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	48.000.000,00	43.741.680,00	91,13
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	41.000.000,00	38.682.000,00	94,35
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	657.000.000,00	654.370.500,00	99,60
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	73.000.000,00	70.644.000,00	96,77
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.520.000.000,00	1.512.000.000,00	99,47
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00	561.160,00	56,12
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.506.500.000,00	1.484.826.056,00	98,56
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.780.000.000,00	2.780.000.000,00	100,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	194.000.000,00	193.410.000,00	99,70
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.103.000,00	166.408.670,00	97,83
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.000.000,00	54.600.000,00	99,27
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.200.000,00	2.940.000,00	91,88
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.000.000,00	98.280.000,00	98,28
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.300.000,00	3.041.640,00	92,17
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	1.753.390,00	87,67
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	1.960,00	65,33
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	5.342.400,00	89,04
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	200.000,00	112.320,00	56,16
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.000,00	336.960,00	84,24
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	316.506.400,00	79,13
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	150.000.000,00	101.606.400,00	67,74
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	250.000.000,00	214.900.000,00	85,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.635.236.744,00	187.621.992.214,00	93,05
5.1.02.01	Belanja Barang	40.438.440.868,00	38.262.832.667,00	94,62
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.411.440.868,00	38.235.832.667,00	94,62
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	56.582.355.524,00	52.215.657.666,00	92,28
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.882.419.924,00	43.207.372.365,00	92,16
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.721.485.600,00	3.718.905.500,00	99,93
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.234.928.000,00	1.169.128.869,00	94,67
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.720.050.000,00	2.195.878.000,00	80,73



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.331.000,00	21.322.900,00	99,96
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	440.000.000,00	440.000.000,00	100,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	396.000.000,00	396.000.000,00	100,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.128.541.000,00	1.029.450.032,00	91,22
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.681.044.041,00	15.233.082.039,00	97,14
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.186.370.700,00	3.931.218.293,00	93,91
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.916.107.341,00	2.726.894.746,00	93,51
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.578.566.000,00	8.574.969.000,00	99,96
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	69.818.199.061,00	63.653.691.348,00	91,17
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.818.199.061,00	63.653.691.348,00	91,17
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.703.220.000,00	5.933.090.000,00	88,51
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.299.620.000,00	5.529.490.000,00	87,77
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	403.600.000,00	403.600.000,00	100,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.580.397.850,00	5.580.397.850,00	100,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.580.397.850,00	5.580.397.850,00	100,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.831.579.400,00	6.743.240.644,00	98,71
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.831.579.400,00	6.743.240.644,00	98,71
5.1.05	Belanja Hibah	30.246.300.000,00	30.188.250.750,00	99,81
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.020.185.000,00	28.010.185.000,00	99,96
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.945.185.000,00	27.935.185.000,00	99,96
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	240.775.000,00	228.137.500,00	94,75
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	240.775.000,00	228.137.500,00	94,75
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.985.340.000,00	1.949.928.250,00	98,22
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.328.670.000,00	1.328.670.000,00	100,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	656.670.000,00	621.258.250,00	94,61



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.303.619.840,00	4.297.021.000,00	99,85
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.275.000.000,00	1.270.000.000,00	99,61
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.275.000.000,00	1.270.000.000,00	99,61
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.028.619.840,00	3.027.021.000,00	99,95
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.528.619.840,00	2.527.021.000,00	99,94
JUMLAH BELANJA OPERASI		389.285.857.099,00	368.651.472.619,00	94,70
5.2	BELANJA MODAL	212.468.226.590,00	202.033.467.599,00	95,09
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	88,73
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	88,73
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	88,73
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.426.116.413,00	33.676.841.899,00	97,82
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.657.408.571,00	3.645.226.985,00	99,67
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.613.408.571,00	3.601.226.985,00	99,66
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.435.064.000,00	6.186.150.000,00	96,13
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.435.064.000,00	6.186.150.000,00	96,13
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	351.075.000,00	350.715.125,00	99,90
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	30.375.000,00	30.303.000,00	99,76
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	105.000.000,00	104.992.125,00	99,99
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	215.700.000,00	215.420.000,00	99,87
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.666.273.628,00	5.391.956.867,00	95,16
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	61.194.150,00	60.703.000,00	99,20
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.707.484.880,00	4.455.639.697,00	94,65
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	897.594.598,00	875.614.170,00	97,55
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	373.797.250,00	357.876.000,00	95,74



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	348.197.250,00	332.612.000,00	95,52
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	22.600.000,00	22.600.000,00	100,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	3.000.000,00	2.664.000,00	88,80
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.769.779.664,00	7.698.727.732,00	99,09
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.494.556.876,00	7.423.982.732,00	99,06
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	275.222.788,00	274.745.000,00	99,83
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.837.831.980,00	3.798.810.660,00	98,98
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	83.248.300,00	80.512.980,00	96,71
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.610.124.000,00	3.588.948.000,00	99,41
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	124.459.680,00	109.349.680,00	87,86
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.269.194.470,00	3.214.549.280,00	98,33
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.175.732.870,00	3.121.190.280,00	98,28
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	93.461.600,00	93.359.000,00	99,89
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.263.464.500,00	1.260.443.000,00	99,76
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	95.000.000,00	92.000.000,00	96,84
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.168.464.500,00	1.168.443.000,00	100,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	383.177.600,00	380.669.000,00	99,35
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	383.177.600,00	380.669.000,00	99,35
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	555.732.500,00	528.400.000,00	95,08
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	555.732.500,00	528.400.000,00	95,08
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	863.317.250,00	863.317.250,00	100,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	863.317.250,00	863.317.250,00	100,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.827.899.937,00	92.894.711.664,00	94,96
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	91.557.352.437,00	86.766.174.039,00	94,77
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.177.312.437,00	84.464.295.439,00	94,72
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.380.040.000,00	2.301.878.600,00	96,72
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.270.547.500,00	6.128.537.625,00	97,74
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.270.547.500,00	6.128.537.625,00	97,74
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.600.987.940,00	61.587.257.321,00	93,88
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	29.330.223.700,00	28.496.514.475,00	97,16
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	20.524.577.800,00	20.088.144.315,00	97,87
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.805.645.900,00	8.408.370.160,00	95,49
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.438.531.990,00	12.362.224.460,00	85,62
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.488.139.500,00	1.464.207.447,00	98,39
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.166.776.480,00	4.205.108.513,00	68,19
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	19.216.000,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.764.400.010,00	6.692.908.500,00	98,94
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	18.661.515.100,00	17.721.319.986,00	94,96
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	9.607.364.000,00	8.847.039.486,00	92,09
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.138.435.500,00	4.130.650.500,00	99,81
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	187.536.100,00	187.530.000,00	100,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	4.488.179.500,00	4.486.100.000,00	99,95
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	170.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.170.717.150,00	3.007.198.400,00	94,84



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	720.000.000,00	715.540.000,00	99,38
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.450.717.150,00	2.291.658.400,00	93,51
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.565.834.900,00	4.559.190.025,00	99,85
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.082.510.000,00	4.075.865.125,00	99,84
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.082.510.000,00	4.075.865.125,00	99,84
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	483.324.900,00	483.324.900,00	100,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	483.324.900,00	483.324.900,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	93,70
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	93,70
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	93,70
	JUMLAH BELANJA MODAL	212.468.226.590,00	202.033.467.599,00	95,09
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07
5.4	BELANJA TRANSFER	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Percentase Capaian
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	706.370.894.989,00	674.378.235.228,00	95,47
	SURPLUS/DEFISIT	(59.884.731.412,00)	(30.793.427.053,00)	51,42
6	PEMBIAYAAN DAERAH	59.884.731.412,00	59.884.731.412,00	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.884.731.412,00	59.884.731.412,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.884.731.412,00	59.884.731.412,00	100,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	592.312.122,00	592.312.122,00	100,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	592.312.122,00	592.312.122,00	100,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.495.735.464,00	14.495.735.464,00	100,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	14.495.735.464,00	14.495.735.464,00	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	44.796.683.826,00	44.796.683.826,00	100,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	31.194.136.200,00	31.194.136.200,00	100,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	10.992.547.626,00	10.992.547.626,00	100,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.884.731.412,00	59.884.731.412,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	59.884.731.412,00	59.884.731.412,00	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	29.091.304.359,00	0,00



h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.

Pelaksanaan program kegiatan serta alokasi anggaran dan realisasi belanja urusan pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 di jelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.7 : Program Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	Urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp19.095.362.950	Rp15.668.586.800
		Program Pengembangan Kurikulum	Rp669.893.160	Rp664.241.800
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp366.452.000	Rp180.850.000
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp25.432.000	Rp0
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61,005,427,381	55,975,425,677
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,201,810,461	969,750,990
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	178,160,000	146,090,000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	104,162,300	103,492,000
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.951.303.750	4.987.201.035
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.658.268.000	11.899.120.843
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	387.536.100	385.799.000
		Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Air Limbah	4.705.435.500	4.695.195.500
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6.871.114.510	6.789.993.000
		Program Penataan Bangunan Gedung	27.849.207.900	27.645.501.829



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	300.000.000	300.000.000
		Program Penyelenggaraan Jalan	34.825.059.800	34.023.065.765
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	163.875.360	140.000.000
		Program Penyelenggaran Penataan Ruang	2.546.688.000	2.046.688.000
4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	96.087.120	96.087.120
		Program Kawasan Permukiman	2.125.546.745	2.124.915.462
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.182.028.030	3.020.327.400
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	773.255.700	734.485.000
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.340.511.160	1.338.827.870
		Program Penanggulangan Bencana	3.266.536,400	3.234.374,219
6	Urusan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	70.000.000	70.000.000
		Program Rehabilitasi Sosial	760.000.000	759.089.500
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	178.785.000	177.576.000
		Program Penanganan Bencana	139.750.000	139.150.000
7	Urusan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	416.129.845.00	415.899.342.00
		Program Hubungan Industrial	20.281.215.00	18.671.000.00
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	804.800.000	804.800.000
		Program Perlindungan Perempuan	250.025.000	245.570.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	322.700.000	322.700.000
9	Urusan Pangan	Program Peningkatan	511.072.320	510.721.820



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	58,939,000	58,939,000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	9,600,000	9,600,000
10	Urusan Pertanahan	Program Pengelolaan Tanah Kosong	2.364.291.910	2.139.674.510
		Program Penatagunaan Tanah	108.157.360	108.157.360
11	Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	80,604,500	80,604,500
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	394,039,850	394,039,850
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah	12,136,500	12,136,500
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Kemasyarakatan	200,000,392	200,000,392
		Peningkatan Kapasitas dan Kepotensi Sumber daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kolompok Masyarakat	152,586,750	152,586,750
		Program Pengelolaan Persampahan	235,411,960	235,411,960
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Rp104,938,994	Rp104,889,132
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp136,541,462	Rp130,058,050
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	330.199.920	281.953.852
		Program Pemberdayaan	1.899.451.716	1.708.379.325



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	938.522.000	342.388.000
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.900.293.000	2.830.653.000
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	455.000.000	388.451.400
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	115.000.000	115.000.000
		Program Perlindungan Perempuan	250.025.000	245.570.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	322.700.000	322.700.000
15	Urusan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,793,626,500.00	2,727,947,000.00
		Program Pengelolaan Pelayaran	3,703,713,000.00	3,575,416,000.00
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,227,763,728	1,224,446,789
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	67,483,826	66,732,000
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	61,025,900	59,875,900
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	93,890,900	92,840,000
18	Urusan Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	19,940,000.00	19,931,160.00
		Program Promosi Penanaman Moda	45,000,000.00	45,000,000.00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	123,254,830.00	123,246,294.00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	355,089,000.00	355,088,500.00
19	Urusan	Program Pengembangan	37,658,600	36,258,600



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Kepemudaan dan Olahraga	Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,258,173,500	1,196,450,000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350,000,000	350,000,000
20	Urusan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	86,620,000	71,713,000
21	Urusan Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	23,240,000	22,280,000
22	Urusan Kebudayaan Kabupaten	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Rp0	Rp0
		Program Pengembangan Kebudayaan	Rp620.312.840	Rp419.937.840
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp523.238.200	Rp460.738.200
		Program Pembinaan Sejarah	Rp0	Rp0
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp406.973.525	Rp374.978.520
23	Urusan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	4,354,758,449	4,339,511,822
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	384,968,900	374,993,900
24	Urusan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	130,750,450	127,711,360
25	Urusan Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,242,176,712	2,142,244,773
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	942,615,910	931,069,800
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	126,259,360	126,139,000
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	133,115,060	132,870,000
26	Urusan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	268,072,210	267,573,900
		Program Pemasaran Pariwisata	292,889,800	292,349,800
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hki	130,400,000	130,400,000
		Program Pengembangan	146,460,200	145,660,200



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
27	Urusan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	792,874,870	791,166,310
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,308,850,998	4,251,128,193
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	327,767,070	327,259,960
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	61,097,000	61,040,000
		Program Penyuluhan Pertanian	2,125,936,860	2,118,362,916
28	Urusan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,153,812,500	1,139,687,000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	48,640,000	48,640,000
29	Urusan Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4,538,898,000	4,446,846,489
30	Urusan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	191,746,555.00	191,745,558.00
31	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	110.627.599.693	110.340.844.579
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	930.314.500	930.094.500
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.169.136.000	1.123.332.054
32	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Program Perekonomian dan Pembangunan	285,601,680	277,401,500
33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	2,311,786,825	1,804,124,000
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	319,600,000	319,600,000
34	Fungsi Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,386,010,000.00	1,694,474,000.00



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Urusan Pemerintahan (Inapektorat)			
		Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi	663,495,000.00	624,819,523.00
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Badan Perencanaan Daerah)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.362.858.200	1.336.195.580
		Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.170.255.000	1.169.715.385
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.348.000.000	2.322.190.800

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategi Pemerintah Daerah

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokratis.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sejak ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2013 melalui serangkaian kebijakan dan program sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang relatif telah mengalami kemajuan, namun di sisi lain masih terdapat banyak permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara harapan dan



kenyataan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan dalam RPJMD ini diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan;
3. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

Keterkaitan permasalahan utama dengan permasalahan pokok Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 1.18: Keterkaitan Permasalahan Utama dengan permasalahan pokok Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026



b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi.

Visi pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ini diartikan sebagai kondisi umum yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan yakni tahun 2026. Rumusan visi ini berdasarkan pada pemahaman atas tujuan berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mendorong ketertiban dunia. Tujuan bernegara tersebut telah dijabarkan pula dalam berbagai dokumen perencanaan nasional yakni visi RPJPN 2005-2025 dan visi RPJMN 2019-2024. Selain itu, yang juga menjadi acuan adalah visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yakni visi RPJPD 2018-2023 dan visi RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe pada tahun 2013, tersadari bahwa dalam rangka mengantar masyarakat desa/pedalaman di pulau Wawonii untuk menuju kesejahteraan, keadilan dan kemandirian, mereka terlebih dahulu perlu dibebaskan dari segala isolasi/belenggu ketidakadilan, keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dasar serta akses pada pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, papan serta pendidikan dan kesehatan, merupakan prasarat mutlak bagi upaya membuka isolasi/belenggu ketidakadilan, keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan isu strategis Kabupaten Konawe Kepulauan serta memperhatikan visi RPJPN 2025 dan RPJMN 2019-2024 serta visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, maka visi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021-2026 adalah:

“Menuju Wawonii Bangkit Dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas Tahun 2026”.

Rumusan visi di atas terdiri dari dua frase pokok, yakni frase Wawonii Bangkit dan Frase Lingkaran Hati Emas. Kandungan makna *dari kedua frase tersebut dikemukakan secara singkat sebagai berikut.*

➤ **Wawonii Bangkit**

Kriteria pokok visi ini adalah pada prinsipnya sebuah frase atau akronim dari kata Wawonii berkembang, Wawonii kompetitif dan Wawonii Tangguh.

- **Berkembang** dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki peradaban dan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding dengan kondisi di masa lalu dan di hari ini.



- **Kompetitif** dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki daya saing dan karenanya mampu exist dalam kancah kompetisi lokal, regional, nasional dan bahkan internasional.
- **Tangguh** dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bertahan menghadapi berbagai dinamika perubahan internal dan eksternal sebagai dampak dari pengaruh globalisasi, seperti namun tidak terbatas fenomena revolusi industri 4.0

➤ **Selanjutnya Wawonii Bangkit digambarkan oleh:**

- Kemudahan mendapatkan akses pendidikan melalui pemberian bantuan pendidikan, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, dan kualitas pelayanan pendidikan yang selanjutnya disebut **Wawonii Cerdas**;
- Kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta seluruh masyarakat Wawonii sudah memiliki jaminan atas resiko pembiayaan kesehatannya selanjutnya disebut **Wawonii Sehat**;
- Semua aktivitas sektor perekonomian diharapkan memberikan nilai tambah ekonomi dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas perekonomian yang disebut **Wawonii Produktif**;
- Pelestarian budaya dan beberapa situs bersejarah serta mendukung kepariwisataan daerah yang disebut **Wawonii Berbudaya**;
- Kepedulian terhadap permasalahan sosial masyarakat melalui upaya pengentasan kemiskinan, pemberian bantuan sosial dan kepedulian pemerintah terhadap masalah sosial yang disebut **Wawonii Peduli** terhadap Masalah Sosial.

➤ **Bingkai Lingkaran Hati Emas**

Lingkaran Hati Emas itu sendiri berasal dari komposisi akronim (atau kepanjangan dari): optimalisasi infrastruktur dasar, pembangunan kawasan dan prasarana wilayah, human resources, teknologi informasi dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, untuk mewujudkan Wawonii Bangkit, maka strategi prioritas yang digunakan adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan dan prasarana wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*human resources*), mendorong penguasaan teknologi informasi dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.



2. *Misi.*

Misi Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang dimaksud dalam dokumen ini merupakan bingkai dan target kebijakan utama yang hendak disasar, diimplementasikan, dan diaktualisasikan dalam pembangunan daerah Konawe Kepulauan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun rumusan misi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman dan prasarana wilayah;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii
3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah
4. Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Selanjutnya untuk memberikan pemahaman terhadap esensi penjabaran misi tersebut, serta keterkaitan dengan pokok visi di jelaskan sebagai berikut:

1. **Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman, dan prasarana wilayah;**

Misi ini berupaya untuk melakukan percepatan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, kelistrikan dan air bersih), kawasan pemukiman dalam bentuk penataan perumahan dan prasarana wilayah (Pelabuhan, transportasi, telekomunikasi) dalam upaya menunjang produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Wawonii**

Misi ini mendorong untuk pembentukan daya saing pembangunan SDM yang meliputi pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang budaya dan pembangunan bidang akhlak.

3. **Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah**

Misi ini berupaya untuk penguatan dan pembangunan sektor-sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi baik sektor pertanian, perikanan, parawisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM. Pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan jejaring pemasaran, pengembangan industri termasuk industri tepat guna dan penciptaan nilai tambah ekonomi.



4. Peningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi dan pelayanan publik

Misi ini berupaya menata kualitas Tata Kelola pemerintahan baik sifatnya sinergitas antarkomponen pemerintahan, antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa dalam upaya menciptakan kualitas pelayanan publik guna menunjang produktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Misi ini mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat, tetapi di sisi lain juga berupaya mengkonservasi dan merehabilitasi daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan serta berupaya untuk mencegah terjadinya bencana dan kepedulian yang sangat besar terhadap akibat bencana.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan jangka Menengah

Perumusan isu strategis Kabupaten Konawe Kepulauan dalam laksanakan pembangunan jangka menengah periode pembangunan 2021-2026 diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunan yang mencakup satu permasalahan pokok yakni **“Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Unggulan dan Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan”** sebagai bagian dari terlepasnya dari belenggu keterbelakangan baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adapun permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana pada pembahasan sebelumnya adalah:

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan;
3. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan dokumen perencanaan lainnya Kabupaten Konawe Kepulauan, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Kepulauan periode pembangunan 2021-2026 seperti pada Tabel berikut:



Tabel 1. 8. Isu Strategi Pembangunan Jangka Menengah

NO	Isu Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah	Penjelasan
1	Ketersedian infrastruktur yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wawonii Pembangunan Jalan Strategis menunjang pengembangan kawasan strategis. akses transportasi antar wilayah dan dalam wilayah Pulau Wawonii Pengelolaan Air bersih dan SPAM Pengembangan Kawasan Pemukiman dan perumahan.
2.	Tata Kelola Pemerintahan belum berjalan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> sistem egovernmen yang belum berjalan Standar dan Kompetensi Pejabat Struktural dan Fungsional yang belum ada. Sistem pengembangan dan pemberdayaan ASN berdasarkan jenjang karier.
3.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Akses dan Mutu Pendidikan Akses dan Mutu Pendidikan Akses dan Mutu Pendidikan Derajat Kesehatan yang masih rendah Keberdayaan Gender dan perlindungan perempuan dan anak. Kelestarian Budaya Asli Wawonii menumbuhkan iman dan taqwa.
4.	Pembangunan Sektor Ekonomi Yang Terpadu berbasis Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan Pembangunan Kawasan Industri terpadu berbasis Kawasan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan Ekonomi Mengurangi Kemiskinan dan Kelaparan karena ketersediaan pangan yang kurang Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi di sector pertanian dan perikanan
5.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keteguhan Daerah dalam menghadapi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pengelolaan lingkungan Akses informasi SDA Kemampuan Daerah dalam menghadapi Bencana



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD, pada fase ini adalah fase penyempurnaan fokus-fokus pembangunan tahun sebelumnya dan juga perbaikan penanganan masalah-masalah yang terjadi. Pada tahun tersebut, pemerintah daerah masih akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Selain itu harus direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan alam, disamping itu penyelesaian jalan lingkar masih menjadi prioritas utama sebagai wujud dalam membuka isolasi wilayah. Pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi fokus lain pada tahun ini guna mengimbangi kemajuan pembangunan fisik.

Tema pembangunan tahun 2024 adalah Sinergitas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tema ini ditetapkan dengan melakukan sinkronisasi tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan yang terpadu antar pusat dan daerah. Penyusunan tema diikuti dengan penyusunan prioritas pembangunan daerah. Prioritas daerah juga harus selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Hal ini agar tercipta keterpaduan antar pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten. Adapun arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan SDM Berkualitas;
3. Revitalisasi ekonomi sosial dan budaya;
4. Peningkatan Pelayanan Publik.

1.1.3 Penerapan Pelayanan Standar Minimal (SPM)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan



urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan satu Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan bermutu yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum, sehingga terwujud suatu pelayanan berkualitas menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena: 1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat pemerintah



daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat. 2. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, perlu didorong percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Melalui 6 (enam) SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan personil daerah dalam bidang bersangkutan. Rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan terdiri atas tiga yaitu

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

b. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV



c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah tangga, Terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
		Mutu pelayanan dasar pemenuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air



d. Bidang perumahan rakyat;

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	<p>Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar</p> <p>Standar jumlah adalah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah jumlah unit rumah rusak akan ditangani daam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>Kualitas pelayanan dasar ditentukan brdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni</p> <p>Mutu pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar</p> <p>Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani</p>	Penerima layanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.



		Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	<p>Fasilitasi berupa: Pendampingan/pembinaan Pembimbingan, Penyuluhan, pelayanan informasi dan Bantuan teknis</p> <p>Bantuan teknis meliputi: Pendampingan penggantian keruagian, Penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) rumah susun umum dan rumah khusus, Pembangunan rumah susun umum, Pembangunan rumah khusus, dan atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah</p>	<p>Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi</p> <p>Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria</p>

e. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan 19 Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 Dalam Negeri di kabupaten/kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di kabupaten/kota;
2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di kabupaten/kota;
4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota;
5. Tingkat waktu tanggap (response time rate);
6. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi; dan



7. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

e. Bidang Sosial,

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Adapun Alokasi anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 di jelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.11. Anggaran umum standar pelayanan minimal T.A 2024

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Anggrana(Rp)
1	Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan	40.458.235.270
2	Kesehatan	1. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta 2. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Kesehatan 3. Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Kesehatan 4. Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 5. Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan	2.313.536.740



No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Anggrana(Rp)
		<p>skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar</p> <p>6. Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>7. Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>8. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>9. Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>10. Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>11. Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>12. Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun</p>	
3	PU-TR	<p>1. Penyedian kebutuhan pokok air minum sehari-hari</p> <p>2. Penyedian pelayanan pengelahan air limbah</p>	17.358.103.500
4	Perumahan Rakyat	1. Penyedian dan rhabilitasi rumah yang	595.087.120



No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Anggran(Rp)
		layak huni bagi korban bencana 2. Fasilitas penyedian rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten kota	
5	Tatibum Linmas	1. Penurunan gangguan K3 dalam masyarakat 2. Terlaksanakan penyusunan pencegahan bahaya kebakaran diseluruh kecamatan di kabupaten 3. Program Penaggulangan Bencana Daerah	5.520.179.260
6	Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak diluar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis diluar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	745.000.000



BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Indikator Kinerja Makro terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Capaian kinerja makro di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 : Capaian Kinerja Makro Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,32	68,77	2,154
2	Angka Kemiskinan	15,9	15,54	-2.264
3	Angka Pengangguran	1,59	1,51	-5,031
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,79	7,16	156,631
5	Pendapatan Perkapita	44,04	49,69	12,829
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,296	0,284	-4.054

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun 2024 dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Hasil (Outcome) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	103,0727763	Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan dan Bagian Kesra	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,8810528	Dinas Pendidikan Dan Data Emis Kemenag	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,1358457	Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2,8476289	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,7630522	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,5742972	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93,7743191	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	70,6754061	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,4843642	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	64,4949193	Dinas Kesehatan Kabupaten Koawe Kepulauan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,7521685	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	11,5547352	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	44,880303	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	44,4099116	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,6420634	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70,9654399	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	44,499482	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,3703704	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	15,6001384	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	31,7828643	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	19,6346073	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,4880429	BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	100	BPBD Kabupaten Konawe	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Kepulauan	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,75	Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Konawe Kepulauan	
6	Sosial	Percentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	25	PM-PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,6333938	PM-PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	110.522	PM-PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	37,5	PM-PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100	PM-PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	33,9624218	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	28,4927344	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1188,714286	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe Kepulaun	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe Kepulaun	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Surat Keterangan tidak ada Penerima TOL	Surat Keterangan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	SK Nomor 131 MENLHK/SETJEN/PLA2/3/202 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung	
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Kesbangpol Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	82,34	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan.	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	74,1648107	Karena Keterbatasan Anggaran dan Sumber daya manusia, Saat Ini Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan Hanya menangani Sampah yang ada di Kecamatan Wawonii Barat sebagai Pusat Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan sedangkan masyarakat yang ada di 6 Kecamatan lainnya mereka mereka sampah secara mandiri.	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	50	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan.	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	97,8713543	PDAK Dukcapil Kemendagri 31 Desember 2023	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	45,4150109	PDAK Dukcapil Kemendagri 31 Desember 2023	
		Kepemilikan akta kelahiran	94,220715	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Konawe Kepulauan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0	Dinas Dukcapil Kab. Konawe Kepulauan	
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	85,7142857	IDM Desa Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	15,7894737	IDM Desa Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,68	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,8613986	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,9614299	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,66	Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,011	Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80,952381	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	95,2533333	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan	
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	9,0909091	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	42,6666667	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-61,2487456	Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	15,2787049	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	19,3841789	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Peningkatan prestasi olahraga	11	Pada Event Olahraga Nasional maupun Internasional Kabupaten Konawe Kepulauan Belum mendapatkan medali	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				namun pada event kejuaraan Provinsi pada tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan memperoleh total 11 medali.	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Sumber Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Sumber Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Surat Keterangan Belum memiliki Indeks Keamanan Informasi Sumber Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan	Surat Keterangan
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Surat Keterangan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	39,85	Surat Keterangan Tidak melaksanakan kegiatan mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat Karna Kabupaten Konawe Kepulauan sedang membangun perpustakaan Daerah.	Surat Keterangan
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	0	Surat Keterangan Belum ada Peraturan Pengelolaan Arsip	Surat Keterangan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Surat Keterangan Belum ada Peraturan Pengelolaan Arsip Kabupaten Konawe Kepulauan	Surat Keterangan
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (: one data KKP)	110,183908	Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan	
26	Pariwisata	<p>Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>Percentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota</p> <p>Tingkat hunian akomodasi</p> <p>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku</p> <p>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</p>	<p>85</p> <p>8,6339306</p> <p>22,4396608</p> <p>44,61</p> <p>11,1250677</p>	<p>Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan</p> <p>LRA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dan LRA Dinas Pariwisata Tahun 2023</p>	
27	Pertanian	<p>Produktivitas pertanian per hektar per tahun</p> <p>Produktivitas pertanian per tahun</p> <p>Percentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</p> <p>Percentase kasus zoonosis kab/ kota</p>	<p>504,4995234</p> <p>-62,2971286</p>	<p>Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan</p>	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
28	Kehutanan		100	Surat Keterangan Bukan Kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan	Surat Keterangan
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	Surat Keterangan Bukan Kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan	Surat Keterangan
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	42,1568627	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	Surat Keterangan Belum ada Penerima dan alat-alat belum dilakukan kalibrasi ulang	Surat Keterangan
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	32,8125	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan	Surat Keterangan
32	Transmigrasi		100	PM-PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3 : Hasil Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,5870149	LRA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Rasio PAD	2,6834512	: LRA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	49,5517476	LRA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Opini Laporan Keuangan	5	Laporan Keuangan Tahun 2024 Belum di rilis oleh BPK Namun capaian Laporan Keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023 adalah WTP	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	87,9708384	SIRUP dan LPSE Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	38,3889442	LRA Kabupaten Tahun 2024, SIRUP dan LPSE Kabupaten Konawe Kepulauan	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	26,6039222	LKPP 2023 dan LKPP 2022	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	93,7625755	BKPSDM Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,0663984	BKPSDM Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)	29,0909091	BKPSDM Kabupaten Konawe	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Kepulauan Tahun 2024	
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4,5291588	LRA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,1232062	LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	
		Manajemen Aset	4	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,71906	LRA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dan APBD Sebelum Perubahan Tahun 2023	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95,4708412	LRA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan	



2.2.3. Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sekaligus memberikan gambaran kepada Pemerintah tentang keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ini disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka secara sistimatis dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja indikator dan analisis penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja indikator masing-masing sasaran.

Hasil pengukuran realisasi dan tingkat capaian kinerja indikator dari masing-masing sasaran strategis selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024. Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja indikator dari sasaran strategis Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Sasaran strategis Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur	Nilai	45,00	45,00	100,00%
		Indeks Konektivitas	Nilai	1,70	2,143	126,06%
2	Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Masyarakat	Indeks Mutu Pendidikan	Nilai	11,00	11,00	100,00%
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,56	9,46	81,83%
3	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,92	70,29	101,99%
4	Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	20,00	53,85	269,25%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii	Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii	Nilai	35,00	35,00	100,00%
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	4,74	2,79	58,86%
7	Meningkatnya akses lapangan kerja	Angka Pengangguran	Angka	0,92	1,51	60,93%
8	Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Angka Gini Ratio	Angka	0,220	0,28	129,09%
9	Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Kategori Desa Maju	Berkembang	Berkembang	100,00%
10	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Kategori	BB	B	66,67%
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00%
		Nilai LPPD	Kategori	Tinggi	Sedang	66,67%
11	Meningkatnya ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman	Angka Kriminalitas	Nilai	-52,3	-52,3	100,00%
12	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dan akses informasi SDA	Indeks Kualitas Air	Nilai	0,50	0,50	100,00%
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	90,00	90,00	100,00%
13	Meningkatnya Kemampuan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	120,00	159,31	75,32%

Tingkat capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 adalah rata-rata sebesar 102,04% yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu 98,33%. Hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 selengkapnya disajikan pada Tabel III.2 sebagai berikut :



Tabel 2.5 : capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah	113,03%
2	Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Masyarakat	90,92%
3	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	101,99%
4	Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan	269,25%
5	Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii	100,00%
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	58,86%
7	Meningkatnya akses lapangan kerja	60,93%
8	Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	129,09%
9	Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa	100,00%
10	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	77,78%
11	Meningkatnya ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman	100,00%
12	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dan akses informasi SDA	100,00%
13	Meningkatnya Kemampuan daerah dalam menghadapi bencana	75,32%
Total / Rata-rata Capaian		105,94%

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan (diuraikan) Capaian Kinerja per sasaran strategis, sesuai sasaran yang ada dalam RPJMD 2021-2026. Pada tiap sasaran terdiri atas satu atau lebih indikator dan tiap indikator ukuran capaiannya berada pada capaian kinerja OPD. Selanjutnya terdapat sasaran yang capaiannya mencakup dua OPD atau lebih, sebab sasaran tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi dari beberapa OPD.

Capaian setiap sasaran dapat didukung dengan beberapa program atau beberapa kegiatan yang berada pada satu atau beberapa OPD. Dukungan tersebut adalah melalui program dan kegiatan yang relevan serta menunjang pencapaian sasaran. Selanjutnya Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, hal itu dapat kami uraikan per sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kawasan Pemukiman, dan Prasarana Wilayah



Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan keterhubungan antar kawasan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan

Sasaran Strategis 1 :Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah

Tabel 2.6 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Infrastruktur	45,00	45,00	100
		1,7	2,143	126,06

Sumber : Data BPS

Berdasarkan target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 indeks Infrastruktur yaitu 45,00 Realisasi indeks infrastruktur pada tahun 2024 yakni 45,00. Hasil evaluasi capaian kinerja dari indikator indeks Infrastruktur yaitu sebesar 100%.

Realisasi indikator indeks konektivitas wilayah dalam kondisi mantap telah tercapai secara maksimal pada tahun 2024. Jalan kualitas mantap itu sendiri, terdiri dari jumlah jalan kualitas baik dan kualitas sedang. Sedangkan dalam realisasi tahun ini proporsi jalan dalam kondisi baik dan sedang mencapai angka 21,11% dari total jalan keseluruhan se-Kabupaten Konawe Kepulauan. Kendala yang dihadapi pada indikator ini pun sama dengan kendala yang dialami pada IKU OPD tingkat kinerja jaringan jalan. Sedangkan untuk realisasi tahun 2024 terhadap sasaran dan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Capaian kinerja organisasi akan diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama selama satu tahun. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator sasaran menggambarkan capaian indikator *outcome*. Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator sasaran dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.



Tabel 2.7 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1.	Indeks Infrastruktur	45	40	35,00
2.	Indeks Konektivitas	2,143	2,143	2,143

Indeks infrastruktur dan konektivitas wilayah di Kabupaten Konawe Kepulauan selama 3 tahun terakhir tergambar pada tabel di atas yang dimana menunjukkan tren meningkat yang berarti bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Konawe Kepulauan terus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jika dilihat yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan dapat di lihat sebagai perbandingan pada variabel yang berkaitan yaitu indeks kinerja sistem irigasi dan tingkat layanan prasarana jalan, untuk persentase pengelolaan SDA sesuai pola dan rencana pengelolaan SDA juga termasuk sebagai variabel yang berpengaruh, namun baru digunakan pada tahun ini sehingga data historisnya tidak tersedia. Pertumbuhan naik turunnya indikator ini, tidak secara langsung dipengaruhi oleh indikator berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, bisa dilihat di tahun ketika indikator ini mengalami peningkatan dan penurunan indikator berkaitan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan bisa saja sebaliknya.

Pada indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik untuk tahun sebelum 2024 indikator yang digunakan adalah jaringan jalan dalam kondisi mantap sehingga data-data yang tersedia pada tahun- tahun sebelumnya adalah target, realisasi, dan capaian dari jaringan jalan kualitas mantap. Jika dilihat dari nilai kondisi jalan dalam kondisi mantap, maka dari tahun ke tahun telah terjadi pertumbuhan terus menerus.

Penilaian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan target dari capaian kinerja pada Unit Kerja Eselon II. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan, dan indikator yang termuat dalam RPJMD, Renja, dan RKA. Adapun rincian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 2.8 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Infrastruktur	50	45	90,00
2.	Indeks Konektivitas	1,8	2,143	119,06

Sumber : Data Diolah



Selanjutnya evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap realisasi indikator kinerja utama tahun 2024 dengan target akhir yang ingin dicapai. Di tahun 2024, capaian menunjukkan kenaikan capaian yang konsisten seperti kenaikan tahun - tahun sebelumnya namun umumnya belum sepenuhnya mencapai target dari tahun terakhir RPJMD.

Tabel 2.9 : Realisasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Target Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		KET.
		KONKEP	PROVINSI	
1.	Indeks Infrastruktur	45	-	Tidak ada
1.	Indeks Konektivitas	2,143	-	Tidak ada

Sumber : Data Diolah

Tabel 2.10 : Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Indeks Infrastruktur	45,00	45,00	100	Meningkatnya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan	-	-
Indeks Konektivitas	1,7	2,143	126,06	Meningkatnya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan	-	-

Sumber : Data Diolah

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Masyarakat

Tabel 2.11 : Target dan Realisasi Tahun 2024

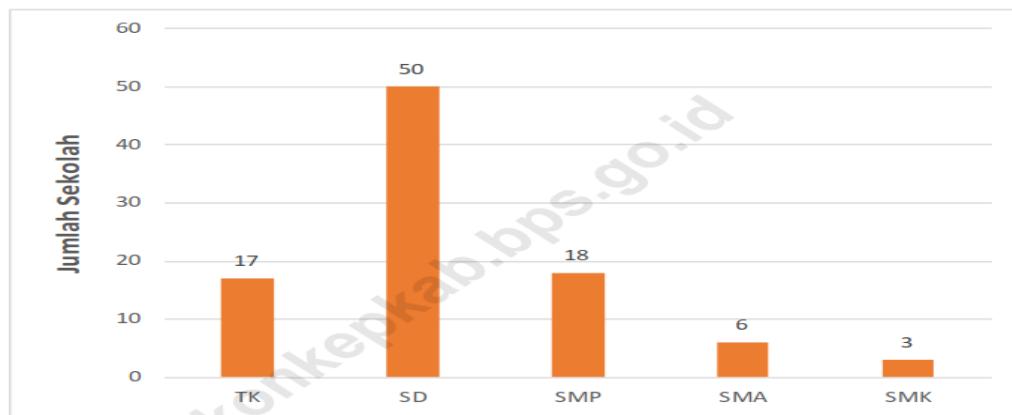
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Mutu Pendidikan	11,00	11,00	100,00%
2	Rata-Rata Lama Sekolah	11,56	9,46	81,83%

Sumber : <https://konkepkab.bps.go.id>, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan

Dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Daerah di atas, yaitu terpeliharanya kondisi Angka RLS menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Nilai HLS



Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami pertumbuhan dibandingkan sebelumnya. Hal ini karena harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek.



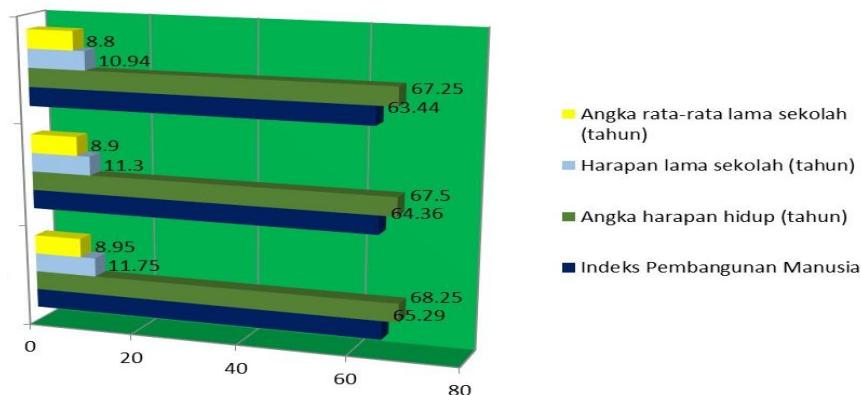
Sumber/Source : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil/Ministry of Education and Culture, Basic Education Data System, odd semester report data

Disisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indicator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangan relatif lebih baik. Dengan demikian, indikator pengetahuan menggambarkan capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas disuatu wilayah. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan yang masih bersekolah memiliki harapan untuk menjalani pendidikan formal sesuai standar yang ideal.

Tabel 2.12 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1.	Indeks Mutu Pendidikan	11,00	10,6	10,30
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,46	9,45	8,50

Sumber : <https://konkepkab.bps.go.id>, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe





Tabel 2.13 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Mutu Pendidikan	12	11,00	91,67
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	12	9,46	78,83

Perkembangan IKU Angka Rata-rata lama sekolah (ALS) dilihat dari grafik mengalami peningkatan yang stabil. Begitupun dengan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) juga mengalami peningkatan jika dilihat dari grafik diatas.

Tabel 2.14 : Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah di lakukan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Indeks Mutu Pendidikan	11,00	11,00	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dasar tinggi. • Tersedianya gedung, sarana prasarana pendidikan yang baik • Adanya Program Bantuan Beasiswa Wawonii Cerdas 	-	-
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	11,56	9,46	81,83%		-	-

Sumber : <https://konkepkab.bps.go.id>, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii

Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan

Tabel 2.15 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Angka harapan hidup (tahun)	68,92	70,29	101,99

Sumber : <https://konkepkab.bps.go.id>, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan



Dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Daerah di atas, yaitu terpeliharanya kondisi aman pada aspek kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup diimplementasikan dan dilaksanakan melalui berbagai program yang tercantum di dalam dokumen RPJMD dan RKPD tahun 2024.



Angka Usia Harapan Hidup sendiri menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Indikator ini adalah indikator komposit yang dapat menggambarkan perbaikan status kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan antara lain peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan gizi dan kesehatan lingkungan.

Berdasarkan target, realisasi dan capaian kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator Angka Usia Harapan Hidup telah mendekati target dengan capaian 101,99%, atau dengan kata lain status kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum cukup baik.

Tabel 2.16 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1.	Angka harapan hidup (tahun)	70,29	68,52	68,46

Sumber : <https://konkepkab.bps.go.id> Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan

Tabel 2.17 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI/s/d 2024	CAPAIAN (%)
1.	Angka harapan hidup (tahun)	70,7	70,29	99,42



Realisasi capaian indikator Angka Usia Harapan Hidup tahun 2024 jika dibandingkan dengan pencapaian target akhir periode RPJMD tahun 2026 sebesar 70,7 dengan capaian realisasi sebesar 99,42 masih ada kesenjangan kurang lebih 3 persen, dengan demikian pemerintah daerah dapat menyimpulkan bahwa kinerja di bidang kesehatan sudah baik.

Meskipun capaian Angka Usia Harapan Hidup secara umum menunjukkan perbaikan namun Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan masih tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Oleh karena Angka Usia Harapan Hidup adalah indikator komposit yang terkait dengan keadaan gizi, kesehatan ibu dan anak, kondisi kesehatan lingkungan, maka permasalahan UHH merupakan masalah sangat kompleks dan intervensinya membutuhkan peran serta lintas program dan lintas sektor secara terintegrasi.

Tabel 2.18 : Realisasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Target Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			KET
		KONKEP	PROVINSI	NASIONAL	
1.	Angka harapan hidup (tahun)	70,29	71,88	72,39	-

Tabel 2.19 : Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah di lakukan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Angka harapan hidup (tahun)	68,92	70,29	101,99	Dukungan yang kuat dari Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat setempat	-	-

Sumber : <https://konkepkab.bps.go.id>, Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan Perempuan

Tabel 2.20 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	20,00	53,85	269,25

Sumber : Statistik BPS



Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pada Indikator Pemberdayaan Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Tabel 2.21 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,85	51,19	51,48

Sumber : Statistik BPS

Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu diwujudkan dalam kebijakan daerah maupun dalam kebijakan informal yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut masing- masing elemen masyarakat dan individu mempunyai sensitifitas gender dan program-program Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.

Tabel 2.22 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI/s/d 2024	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	40,00	53,85	134,625

Sumber : Statistik BPS



Tabel 2.23 : Realisasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Target Provinsi/Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	
		KONKEP	PROVINSI
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,85	73,58

Tabel 2.24 : Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	20,00	53,85	269,25	Meningkatnya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Kebijakan dan partisipasi masyarakat	-	-

Sumber : Olah Data

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii

Tabel 2.25 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii	35,00	35,00	100

Sumber : Data Diolah

Tabel 2.26 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1.	Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii	35,00	25,00	15,00

Sumber : Data Diolah



Tabel 2.27 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii	60	35	58,33

Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Potensi Daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah

Tabel 2.28 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan	4,74	2,79	58,86

Sumber : <https://konkepkab.bps.go.id>

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan memasuki akhir tahun 2024, perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan drastic dibandingkan tahun sebelumnya akibat dari pandemi dimana angka pertumbuhan ekonomi turun drastic namun kembali stabil pasca pandemi. Begitupun demikian, Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian/Perikanan Tahun 2024 Kab. Konawe Kepulauan juga mengalami penurunan yang signifikan dampak dari pandemi yang melanda seluruh dunia.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB tiap satu orang penduduk.

Tabel 2.29 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1.	Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan	2,79	2,79	3,23

Sumber : Data Diolah



Tabel 2.30 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan	6,26	2,79	44,57

Nilai absolut PDRB sektor unggulan ini menunjukkan besarnya produksi sektor unggulan di suatu daerah atau wilayah, perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan) atau lebih dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di suatu daerah atau wilayah tersebut. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB tiap satu orang penduduk.

Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya akses lapangan kerja

Tabel 2.31 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Angka Pengangguran	0,92	1,51	60,93

Tabel 2. 32 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1	Angka Pengangguran	1,51	1,59	1,85

Tabel 2.33 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
1	Angka Pengangguran	0,82	1,51	54,30



Tabel 2.34 : Realisasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Target Provinsi/Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			KET.
		KONKEP	NASIONAL	PROVINSI	
1	Angka Pengangguran	1,51	5,32	3,66	

Sumber : Statistik BPS

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja **Angka Pengangguran** Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan dan lebih baik dibandingkan target tingkat provinsi Sulawesi Tenggara serta semakin jauh dari target secara nasional.

- Tujuan 4** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sasaran Strategis 8 : Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan Masyarakat

Tabel 2.35 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Gini	0,220	0,28	129,09

Sumber : Data BPS

Berdasarkan target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 indeks gini yaitu 0,22 Realisasi indeks gini pada tahun 2024 yakni 0,28. Hasil evaluasi capaian kinerja dari indikator indeks gini yaitu sebesar 129,09%.

Tabel 2.36 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1.	Indeks Gini	0,28	0,350	0,350

Indeks gini di Kabupaten Konawe Kepulauan selama 3 tahun terakhir tergambar pada tabel di atas yang dimana menunjukkan mengalami tren yang fluktuasi berarti bahwa indikator di Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah indeks gini atau Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dan terlihat bahwa ketimpangan mengalami penurunan. Hal ini berarti perbedaan keadaan ekonomi tiap lapisan masyarakat lebih merata dari tahun sebelumnya.



Tabel 2.37 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI s/d 2023	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Gini	0,28	0,28	100,00

Sumber : Data Diolah

Selanjutnya evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap realisasi indikator kinerja utama tahun 2024 dengan target akhir yang ingin dicapai. Di tahun 2024 ini, capaian menunjukkan kenaikan capaian yang konsisten seperti kenaikan tahun - tahun sebelumnya namun umumnya belum mencapai target dari tahun terakhir RPJMD.

Tabel 2.38 : Realisasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Target Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			KET
		KONKEP	PROVINSI	NASIONAL	
1.	Indeks Gini	0,280	0,370	0,373	-

Sumber : Data Diolah

Tabel 2.39 : Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah di lakukan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Indeks Gini	0,220	0,280	129,09	Meningkatnya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan	-	-

Sumber : Data Diolah

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Tabel 2.40 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Desa Membangunan	Berkembang	Berkembang	100

Sumber : Data Diolah

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 2.41 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1.	Indeks Desa Membangunan	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sumber : Data Diolah

Realisasi Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mewujudkan Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah mengembangkan potensial Desa menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah



Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989

Tabel 2.42 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Desa Membangunan	Berkembang	Berkembang	100

IDM disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Tabel 2.43 : Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Indeks Desa Membangunan	Berkembang	Berkembang	100	-Kesadaran masyarakat terhadap kemajuan pembangunan.	-	-

Sumber : Data Diolah

- Misi 4** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
- Tujuan 5** : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- Sasaran Strategis 10** : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaran

Tabel 2.44 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
2	Nilai SAKIP	BB	B	66.67
3	Nilai LPPD	Tinggi	Sedang	66,67



1. Berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 Opini Laporan Keuangan ditargetkan mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Realisasi indikator kinerja Opini Laporan Keuangan saat ini belum tersedia dikarenakan masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara.
2. Berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Konawe Kepulauan ditargetkan mendapatkan kategori BB (Sangat aik). Adapun realisasi indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang dirilis oleh Kementerian PAN-RB memperoleh nilai kinerja dengan predikat B (Baik). Hasil evaluasi capaian kinerja jika dibanding target kinerja yakni sebesar 66,67% yang dimana komponen penilaian SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja sampai dengan Pelaporan Kinerja telah mengalami perbaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi dalam waktu singkat, birokrasi yang lambat, dan kurangnya sumber daya. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan pemerintah pusat. Hal ini melibatkan pemecahan masalah-masalah yang mendasari dan peningkatan kapasitas institusi serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
3. Berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) atas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditargetkan dalam kategori Tinggi, .

Tabel 2.45 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP	B	B	B
3	Nilai LPPD	Sedang	Sedang	Sedang

1. **Opini Laporan Keuangan** di Kabupaten Konawe Kepulauan selama 3 tahun terakhir tergambar pada tabel di atas yang dimana menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan peringkat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang



bermakna seluruh informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum capaian kinerja untuk indikator opini BPK R.I telah mencapai target yang diharapkan dari tahun ke tahun.

2. **Nilai SAKIP Kabupaten Konawe Kepulauan** dalam 3 tahun terakhir mengalami trend peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun mulai dari 2022 mendapatkan nilai 60,18 (B) kemudian pada tahun 2023 naik menjadi nilai 61,94 (B) dan pada tahun 2024 yaitu dengan nilai 61,94 (B), belum mencapai target BB (Sangat Baik), namun hal ini tetap menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menata sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan tujuan pembangunan.
3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan dalam 3 tahun selalu mengalami tren perbaikan nilai LPPD, dimana hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan juga penerapan standar pelayanan minimal semakin membaik.

Tabel 2.46 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
2	Nilai SAKIP	B	B	100,00
3	Nilai LPPD	Sedang	Sedang	100,00

Berdasarkan realisasi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian **Nilai SAKIP Kabupaten Konawe Kepulauan** telah mencapai target di akhir tahun perencanaan yaitu untuk predikat B dengan capaian kinerja jika dibandingkan dengan target tersebut yaitu sebesar 100 %. Begitupun dengan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah capaian kinerja jika dibandingkan dengan target tersebut yaitu sebesar 100 %



Tabel 2.47 : Realisasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Target Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			KET.
		KONKEP	NASIONAL	PROVINSI	
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	-	WTP	
2	Nilai SAKIP	B	-	B	
3	Nilai LPPD	Sedang	-	Sedang	

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja **Opini Laporan Keuangan, Nilai SAKIP** dan **Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** Kabupaten Konawe Kepulauan belum memiliki target baik secara nasional maupun provinsi.

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman.

Tabel 2.48 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Penurunan Angka Kriminalitas	-52,3	-52,3	100

Berdasarkan target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 **Penurunan Angka Kriminalitas** sebesar -52,3. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 yakni -52,3. Hasil evaluasi capaian kinerja dari indikator tersebut yaitu sebesar 100 %.

Tabel 2.49 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1	Penurunan Angka Kriminalitas	52,3	52,3	52,3

Penurunan Angka Kriminalitas di Kabupaten Konawe Kepulauan selama 3 tahun terakhir tergambar pada tabel di atas yang dimana menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Konawe Kepulauan tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan capaian kinerja belum mencapai target yang diharapkan dari tahun ke tahun.



Tabel 2.50 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
1	Penurunan Angka Kriminalitas	55,67	52,3	93,95

Berdasarkan realisasi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian **Penurunan Angka Kriminalitas** telah hampir mencapai target di akhir tahun perencanaan yaitu 55,67



Tabel 2.51 : Realisasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Target Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			KET.
		KONKEP	NASIONAL	PROVINSI	
1	Penurunan Angka Kriminalitas	52,3	-	-	

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja **Penurunan Angka Kriminalitas** Kabupaten Konawe Kepulauan belum memiliki target baik secara nasional maupun provinsi.

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana

Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan akses informasi SDA



Tabel 2.52 : Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Kualitas Air	0,5	0,5	100,00
2	Indeks Kualitas Udara	90,00	90,00	100,00

1. Berdasarkan target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 **indeks kualitas air** yaitu 0,5 Realisasi indeks kualitas air pada tahun 2024 yakni 0,5 Hasil evaluasi capaian kinerja dari indikator indeks kualitas air yaitu sebesar 100,00%.
2. Pada perjanjian kinerja tahun 2024, target **Indeks Kualitas Udara** sebesar 90,00. Realisasi indeks kualitas udara di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 yakni 90,00. Hasil evaluasi capaian kinerja dari indikator tersebut yaitu sebesar 100,00%.

Tabel 2.53 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1	Indeks Kualitas Air	0,5	0,6	0,7
2	Indeks Kualitas Udara	90,00	87,00	85,00

1. **Indeks kualitas air** di Kabupaten Konawe Kepulauan selama 3 tahun terakhir tergambar pada tabel di atas yang dimana menunjukkan tren meningkat yang berarti bahwa indikator di Kabupaten Konawe Kepulauan terkategori **Baik (74 - 82)** berdasarkan standar yang ditetapkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Capaian tersebut juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari target yang diharapkan dari tahun ke tahun.
2. **Indeks Kualitas Udara** di Kabupaten Konawe Kepulauan selama 3 tahun terakhir pada tabel di atas yang dimana menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami peningkatan yang cukup signifikan melebihi target yang diharapkan dari tahun ke tahun.



Indeks kualitas udara



Tabel 2.54 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
1	Indeks Kualitas Air	0,3	0,5	60,00
2	Indeks Kualitas Udara	95,00	90,00	94,74

1. Berdasarkan realisasi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian **Indeks kualitas air** masih jauh dari target di akhir tahun perencanaan yaitu 0,3 dengan capaian kinerja jika dengan target tersebut yaitu sebesar 60,00%.
2. Berdasarkan realisasi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian **Indeks Kualitas Udara** telah mendekati target di akhir tahun perencanaan yaitu 95,0 dengan capaian kinerja jika dengan target tersebut yaitu sebesar 94,74%.

Tabel 2.55 : Realisasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Target Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			KET.
		KONKEP	NASIONAL	PROVINSI	
1	Indeks Kualitas Air	0,5	53,88	-	
2	Indeks Kualitas Udara	90,00	88,06	41	

Sumber : IKLH-Kementerian LHK dan AQI US, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja **Indeks kualitas air** Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan dibandingkan target secara nasional serta semakin jauh dari target tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk data indikator **indeks kualitas udara** telah mendekati target nasional dan melampaui target provinsi.

Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya Kemampuan daerah dalam menghadapi bencana



Tabel 2.56 : Target dan Realisasi Tahun 2024

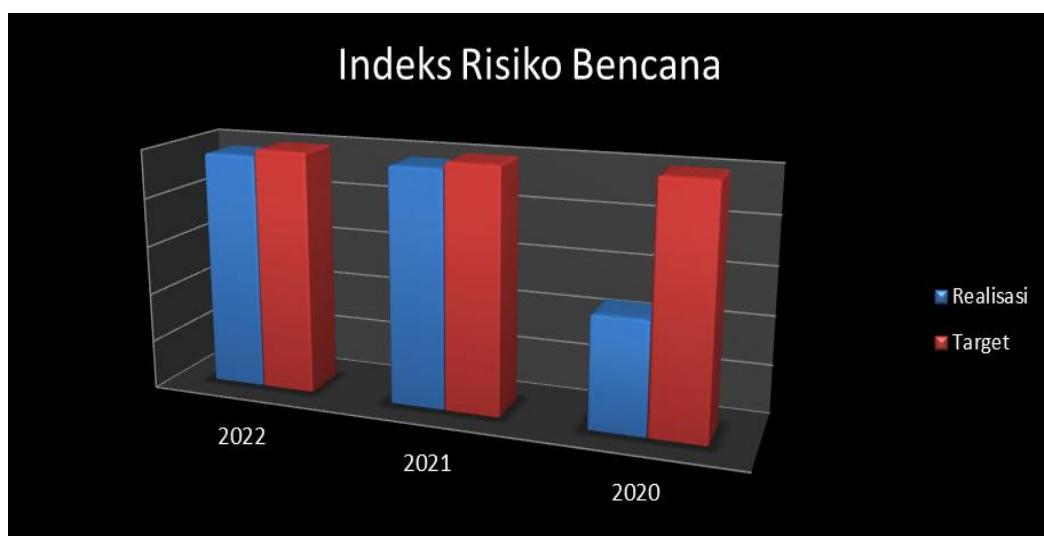
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Risiko Bencana	120	159,31	75,32

Berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 **Indeks Risiko Bencana** ditargetkan ada diambil batas nilai 120. Realisasi indikator kinerja tersebut saat ini telah mencapai target 159,31 dengan capaian kinerja sebesar 75,32% dari target. Hal ini menunjukkan beberapa faktor atau indikator, seperti jenis bencana, keberadaan infrastruktur, kondisi lingkungan sekitar, serta tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana perlu diantisipasi oleh pemerintah karena telah ada dikelas Risiko Tinggi. Dengan menggunakan indeks risiko bencana, membantu pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat guna mengurangi dampak bahaya bencana di wilayahnya.

Tabel 2.57 : Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2024	2023	2022
1	Indeks Risiko Bencana	159,31	159,31	159,31

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Konawe Kepulauan selama 3 tahun terakhir tergambar pada tabel di atas yang dimana menunjukkan bahwa selama 2 tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup tinggi.





Tabel 2.58 : Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja RPJMD (2026)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
1	Indeks Risiko Bencana	90	159,31	56,49

Berdasarkan realisasi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian **Indeks Risiko Bencana** masih jauh dari target di akhir tahun perencanaan yaitu dengan capaian kinerja dibandingkan dengan target tersebut yaitu sebesar 56,49 %.

B. Analisis Realisasi dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis realisasi dan efisiensi anggaran adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat mensupport kinerja sasaran strategis. Alokasi, realisasi dan efisiensi anggaran pencapaian kinerja sasaran pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 selengkapnya disajikan pada Tabel III.20 sebagai berikut:

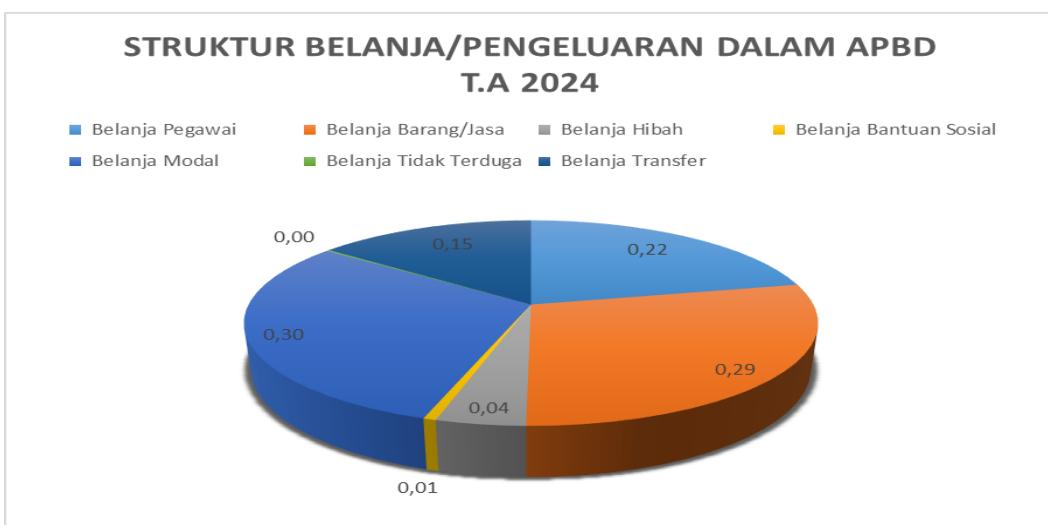
Tabel 2.59
Alokasi, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

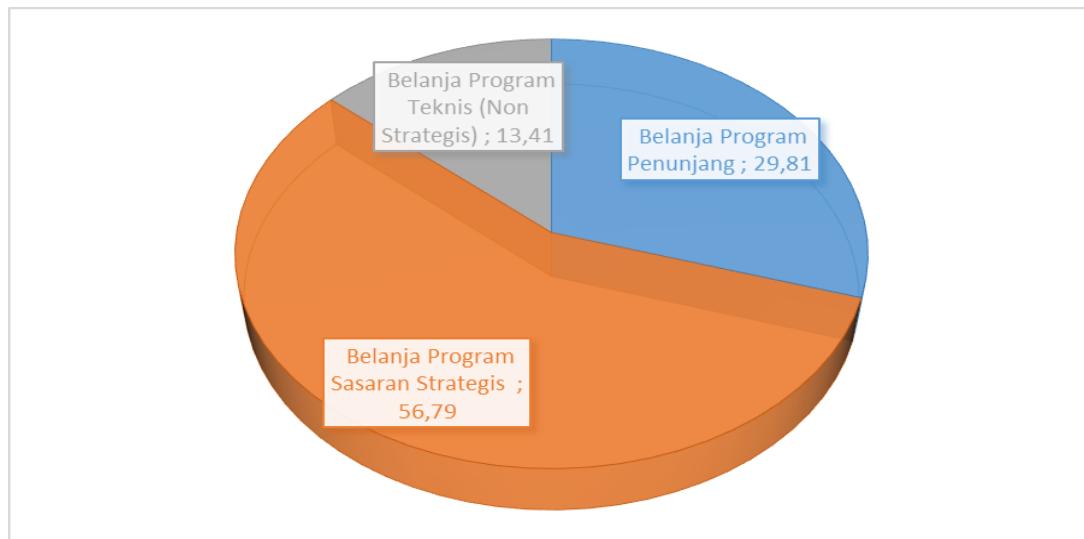
No.	Sasaran Strategis	Anggaran			Rata-rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah	105.289.748.227	97.185.331.791	92,30	116,97%	1,27%
2	Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Masyarakat	43.495.191.138	41.877.513.259	96,28	92,49%	0,96%
3	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	60.162.165.864	56.313.283.098	93,60	99,49%	1,06%
4	Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan	7.381.821.850	7.338.918.060	99,42	255,95%	2,57%
5	Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii	9.006.390.842	8.792.681.628	97,63	100,00%	1,02%
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	7.501.056.726	6.785.365.023	90,46	70,10%	0,77%
7	Meningkatnya akses lapangan kerja	4.167.630.779	3.682.946.516	88,37	70,44%	0,80%
8	Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	2.460.990.080	2.410.256.364	97,94	147,06%	1,50%
9	Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa	2.673.532.438	1.873.951.740	70,09	100,00%	1,43%
10	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	115.142.242.023	47.069.788.133	40,88	77,78%	1,90%



No.	Sasaran Strategis	Anggaran			Rata-rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
11	Meningkatnya ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman	18.800.872.586	18.661.665.530	99,26	100,00%	1,01%
12	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dan akses informasi SDA	13.668.050.817,00	9.911.466.413,00	72,52	100,00%	1,38%
13	Meningkatnya Kemampuan daerah dalam menghadapi bencana	24.676.657.952	24.332.044.547	98,60	87,88%	0,89%
Total / Rata-rata Capaian		706.370.894.989,00	674.402.776.109,00	78,97	104,62%	1,32%

Berdasarkan Tabel 2.59 di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja sasaran pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 diwujudkan melalui penyelenggaraan program-program prioritas yang mendukung langsung pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran Rp706.370.894.989,00 dan realisasi sebesar Rp674.402.776.109,00 (95,47%). Penggunaan anggaran dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien sehingga diperoleh efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 1,32 atau dapat dikatakan sangat efisien (≥ 1).





Perincian alokasi dan realisasi anggaran serta efisiensi anggaran menurut program prioritas yang mendukung sasaran strategis Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.60 sebagai berikut :



Tabel 2.60
Perincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Serta Efisiensi Anggaran
Menurut Program Prioritas yang Mendukung Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur	Nilai	40	40	100,00%	Pendidikan					
		Indeks Konektivitas	Nilai	1,6	2,143	133,94%	Program Pengelolaan Pendidikan	39.647.250.849	38.804.931.579	842.319.270	97,88	
2	Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Masyarakat	Indeks Mutu Pendidikan	Nilai	10,6	10,6	100,00%	Program Pengembangan Kebudayaan	1.655.067.575	1.438.580.280	216.487.295	86,92	
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,12	9,45	84,98%	Program Pengembangan Kurikulum	753.120.055	747.363.000	5.757.055	99,24	
3	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,87	68,52	99,49%	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	436.606.379	335.433.020	101.173.359	76,83	
4	Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	20	51,19	255,95%	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	461.642.820	94.924.000	366.718.820	20,56	
5	Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii	Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii	Nilai	25	25	100,00%	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	541.503.460	456.281.380	85.222.080	84,26	
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	3,98	2,79	70,10%	Kesehatan					



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
7	Meningkatnya akses lapangan kerja	Angka Pengangguran	Angka	1,12	1,59	70,44%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53.987.014.118	50.508.883.798	3.478.130.320	93,56	
8	Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Angka Gini Ratio	Angka	0,238	0,35	147,06%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.868.253.746	5.505.026.300	363.227.446	93,81	
9	Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Kategori Desa Maju	Berkembang	Berkembang	100,00%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	306.898.000	299.373.000	7.525.000	97,55	
10	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Kategori	BB	B	66,67%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	5.164.572.700	5.111.808.726	52.763.974	98,98	
		Nilai LPPD	Kategori	Tinggi	Sedang	66,67%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.430.169.488	12.341.243.488	88.926.000	99,28	
11	Meningkatnya ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman	Angka Kriminalitas	Nilai	-52,3	-52,3	100,00%	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	43.767.074	43.767.000	74	100,00	
12	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dan akses informasi SDA	Indeks Kualitas Air	Nilai	0,6	0,6	100,00%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.196.565.000	1.996.465.000	200.100.000	90,89	
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	87	87	100,00%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	9.879.236.845	9.786.687.335	92.549.510	99,06	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
13	Meningkatnya Kemampuan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	140	159,31	87,88%	Program Penataan Bangunan Gedung	11.305.444.150	10.727.838.250	577.605.900	94,89	
							Program Penyelenggaraan Jalan	49.523.380.564	46.187.031.734	3.336.348.830	93,26	
							Program Pengembangan Jasa Konstruksi	123.330.479	123.330.000	479	100,00	
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.923.582.265	1.923.545.000	37.265	100,00	
							Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman					
							Program Pengembangan Perumahan	95.346.800	95.344.000	2.800	100,00	
							Program Kawasan Permukiman	2.255.126.662	2.241.078.235	14.048.427	99,38	
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.255.172.250	1.206.640.783	48.531.467	96,13	
							Program Pengelolaan Tanah Kosong	8.196.146.250	4.505.459.890	3.690.686.360	54,97	
							Program Penataangunaan Tanah	897.907.700	895.092.350	2.815.350	99,69	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
							Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
							Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	572.606.640	572.605.800	840	100,00	
							Program Penanggulangan Bencana	4.738.711.860	4.648.707.300	90.004.560	98,10	
							Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Nonkebakaran	357.161.430	356.927.430	234.000	99,93	
							Sosial					
							Program Pemberdayaan Sosial	70.264.000	70.264.000	-	100,00	
							Program Rehabilitasi Sosial	30.000.000	20.075.000	9.925.000	66,92	
							Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	753.600.000	745.703.600	7.896.400	98,95	
							Program Penanganan Bencana	238.700.000	237.133.400	1.566.600	99,34	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.317.906.080	1.300.670.364	17.235.716	98,69	
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.520.000	36.410.000	14.110.000	72,07	
							Lingkungan Hidup					
							Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	114.116.561	114.116.561	-	100,00	
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	392.991.050	392.991.050	-	100,00	
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ppjh)	26.911.020	26.911.020	-	100,00	
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	149.994.840	149.994.840	-	100,00	
							Program Pengelolaan Persampahan	284.337.684	283.837.684	500.000	99,82	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
							Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
							Program Pendaftaran Penduduk	413.007.224	393.434.294	19.572.930	95,26	
							Program Pencatatan Sipil	104.938.994	104.889.132	49.862	99,95	
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	256.966.286	250.260.050	6.706.236	97,39	
							Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
							Program Administrasi Pemerintahan Desa	243.239.393	224.128.000	19.111.393	92,14	
							Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.430.293.045	1.649.823.740	780.469.305	67,89	
							Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
							Program Pengendalian Penduduk	1.550.705.090	1.550.705.000	90	100,00	
							Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	467.007.500	466.234.500	773.000	99,83	
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.544.249.200	2.506.538.500	37.710.700	98,52	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
							Program Perlindungan Perempuan	205.644.000	205.300.000	344.000	99,83	
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.014.325.560	2.010.252.560	4.073.000	99,80	
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	200.000.000	200.000.000	-	100,00	
							Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	399.890.500	399.887.500	3.000	100,00	
							Perhubungan					
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Laj)	1.895.337.568	1.844.066.500	51.271.068	97,29	
							Program Pengelolaan Pelayaran	1.197.021.044	1.171.230.500	25.790.544	97,85	
							Komunikasi & Informatika					
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93.617.370	82.353.370	11.264.000	87,97	
							Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.600.523.100	1.600.324.999	198.101	99,99	
							Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	65.948.300	64.452.500	1.495.800	97,73	
							Program Aplikasi Informatika	357.080.000	356.440.000	640.000	99,82	
							Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					
							Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.114.541.657	1.670.428.829	444.112.828	79,00	
							Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	84.136.000	84.136.000	-	100,00	
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	900.872.984	890.242.984	10.630.000	98,82	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	59.950.000	59.950.000	-	100,00	
							Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	98.658.580	96.838.580	1.820.000	98,16	
							Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	716.674.423	689.466.015	27.208.408	96,20	
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	21.664.000	21.608.154	55.846	99,74	
							Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	171.133.135	170.275.954	857.181	99,50	
							Penanaman Modal					
							Program Promosi Penanaman Modal	45.900.000	45.745.107	154.893	99,66	
							Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	281.145.927	280.898.620	247.307	99,91	
							Program Pelayanan Penanaman Modal	760.309.043	709.571.188	50.737.855	93,33	
							Program Hubungan Industrial	27.316.388	27.226.200	90.188	99,67	
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30.000.000	29.427.916	572.084	98,09	
							Perpustakaan					
							Program Pembinaan Perpustakaan	14.198.300.135	14.117.267.234	81.032.901	99,43	
							Program Pengelolaan Arsip	249.621.230	246.649.252	2.971.978	98,81	
							Kelautan Dan Perikanan					
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.273.679.399	1.220.334.498	53.344.901	95,81	
							Program Pengelolaan Perikanan Budaya	518.173.290	414.524.078	103.649.212	80,00	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	262.594.300	247.424.500	15.169.800	94,22	
							Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	134.307.600	127.266.400	7.041.200	94,76	
							Pariwisata					
							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	536.186.825	441.967.975	94.218.850	82,43	
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	831.375.776	818.440.316	12.935.460	98,44	
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.290.548.869	1.283.777.179	6.771.690	99,48	
							Program Pemasaran Pariwisata	177.500.450	177.500.450	-	100,00	
							Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000	500.000.000	-	100,00	
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	111.030.960	110.390.960	640.000	99,42	
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	646.825.000	646.663.670	161.330	99,98	
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.439.976.598	2.362.286.084	77.690.514	96,82	
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	377.808.670	375.849.500	1.959.170	99,48	
							Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	201.000.000	200.836.000	164.000	99,92	
							Program Penyuluhuan Pertanian	1.894.137.694	1.874.969.494	19.168.200	98,99	
							Perencanaan					



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
							Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.109.425.001	2.003.736.130	105.688.871	94,99	
							Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.660.000.000	1.627.315.600	32.684.400	98,03	
							Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	897.900.000	890.517.486	7.382.514	99,18	
							Keuangan					
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	110.627.599.693	42.601.540.579	68.026.059.114	38,51	
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	930.314.500	930.094.500	220.000	99,98	
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.169.136.000	1.123.332.054	45.803.946	96,08	
							Kepegawaian					
							Program Kepegawaian Daerah	2.726.088.870	2.371.380.314	354.708.556	86,99	
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	424.000.000	392.500.000	31.500.000	92,57	
							Inspektorat					
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.977.331.020	1.976.981.000	350.020	99,98	
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	437.860.810	437.840.000	20.810	100,00	
							Kesatuan Bangsa Dan Politik					
							Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	49.587.830	49.455.000	132.830	99,73	
							Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	12.915.389.000	12.897.210.000	18.179.000	99,86	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA				Program	ANGGARAN (Rp)			Capaian Penyerapan (%)	Tingkat Efisiensi
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Selisih		
							Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
							Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	52.658.416	47.880.000	4.778.416	90,93	
							Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	70.770.000	69.150.000	1.620.000	97,71	
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	43.987.410	19.730.000	24.257.410	44,85	
Rata-rata Capaian					104,62%	Total / Rata-Rata Capaian	401.132.138.051	316.793.423.142	84.338.714.909	78,97	1,32%	



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)

Pada tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan mendapatkan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu Kegiatan Pembangunan Konservasi air dan antisipasi Anomali Iklim yaitu berupa Dam/Parit/Longstorage dan irigasi perpipaan untuk tanaman pangan. Dasar Hukum dari tugas pembantuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2016
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 75Tahun 2016; tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 Nomor 75)
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

3. 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Kegiatan Pertanian yang diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan berasal dari Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu Kegiatan Pembangunan Konservasi air dan antisipasi Anomali Iklim yaitu berupa Dam/Parit/Longstorage dan irigasi perpipaan untuk tanaman pangan.

Pembangunan Dam/Parit/Longstorage berjumlah 2 unit yaitu dilaksanakan oleh kelompok tani Asombenao Jaya di Desa Wawoone Kecamatan Wawonii Selatan dengan



anggaran Rp.120.000.000 dan dilaksanakan oleh kelompok tani Labisa Raya di Desa Labisa Kecamatan Wawonii Utara dengan anggaran Rp.120.000.000

Pembangunan irigasi Perpipaan berjumlah 4 unit masing-masing dilaksanakan oleh kelompok tani Makmur di Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Utara dengan anggaran Rp.94.000.000 oleh kelompok tani Toloworo di Desa Wawouso Kecamatan Wawonii Selatan dengan anggaran Rp. 78.960.000 oleh kelompok tani Labadiha Desa Wawobreau Kecamatan Wawonii Utara dengan anggaran Rp. 94.000.000 dan oleh kelompok tani sawa indah raya Desa Sawa Indah Kecamatan Wawonii Utara dengan anggaran Rp. 120.000.000

3. 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan irigasi/pengairan yang diberikan sebanyak 6 (enam) unit dengan total jumlah anggaran Rp. 626.960.000 telah dilaksanakan sesuai dengan jumlah target yang telah diberikan.

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan dari Kementerian Pertanian

3.3.1.1 Target Kinerja

Target Kinerja yang ditetapkan untuk Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 6 unit irigasi dan perpipaan

3.3.1.2 Realisasi

Realisasi kegiatan Pembangunan irigasi pertanian yang telah dicapai adalah 100 % terealisasi, demikian pula dengan realisasi anggaran Pembangunan irigasi dan perpipaan terealisasi 100 %.



**MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKUKAN OLEH DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024**

No	K/KLPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	Kementerian Pertanian	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga	Pembangunan Bangunan dan Konservasi air dan antisipasi anomali iklim berupa Dam Parit / Longstorage	Kelompok Tani Asombenao Jaya desa Wawoone Kecamatan Wawonii Selatan	Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	100%	1 Unit	100%	
2	Kementerian Pertanian	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran	Irigasi Perpipaan Mendukung Tanaman Pangan	Kelompok tani Makmur Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Utara	Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp 94.000.000	Rp 94.000.000	100%	1 Unit	100%	



		Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga									
3	Kementerian Pertanian	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga	Irigasi Perpipaan Mendukung Tanaman Pangan	Kelompok Tani Toloworo Desa Wawouso Kecamatan Wawonii Selatan	Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp. 78.960.000	Rp. 78.960.000	100%	1 Unit	100 %	
4	Kementerian Pertanian	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga	Pembangunan Bangunan dan Konservasi air dan antisipasi Anomali Iklim berupa Dam Parit/Longstorange	Kelompok Tani Labisa Raya Desa Labisa Kecamatan Wawonii Utara	Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	100%	1 Unit	100%	



5	Kementrian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 	Irigasi Perpipaan Mendukung Tanaman Pangan	Kelompok Tani Sawa Indah Raya Desa Sawa Indah Kecamatan Wawonii Utara	Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	100%	1 Unit	100 %	
6	Kementrian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 	Irigasi Perpipaan Mendukung Tanaman Pangan	Kelompok Tani Sawa Indah Raya Desa Sawa Indah Kecamatan Wawonii Utara	Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	100 %	1 Unit	100 %	



3.4. Permasalahan dan Kendala

Kebijakan pemerintah untuk Pembangunan konservasi air dan antisipasi Anomali iklim yaitu berupa Dam/parit/Longstorage dan irigasi perpipaan untuk tanaman pangan cukup efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, hanya saja diperlukan pemberdayaan kelembagaan petani penerima agar manfaat dari bantuan berkelanjutan yang diperoleh oleh para petani benar-benar dapat mendukung pencapaian swasembada pangan.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Kegiatan Pembangunan konservasi air dan antisipasi Anomali iklim yaitu berupa Dam/parit/Longstorage dan irigasi perpipaan untuk tanaman pangan benar-benar sangat membantu para petani. Oleh karena itu kedepannya program-program seperti ini yang bersinggungan langsung dengan para petani untuk lebih di masifkan lagi. Sehingga para petani secara keseluruhan merasakan dampak nya dengan demikian Swasembada pangan di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat terwujud.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Layanan Dasar

Jenis Layanan dasar urusan Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas tiga layanan yaitu

- Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini
- Layanan Pendidikan Dasar
- Layanan Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan di tunjukan pada tabel di bawah ini,

Tabel 4.1 : Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)	TARGET PERSENTASE (%)
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	2409	100
2	Layanan Pendidikan Dasar	7404	100
3	Layanan Pendidikan Kesetaraan	8808	100

4.1.3 Anggaran

Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 berjumlah Rp. 40,458,235,270. Sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Rincian Anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	Apbd Kab. Konawe Kepulauan	706,370,894,989
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	87,349,220,705
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Pd	40,458,235,270
	APBD	40,458,235,270
	A. APBD Murni	40,458,235,270
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK Fisik	0
	D. APBD DAK Non Fisik	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0



B. APBN-Dekonsentrasi	0
C. APBN-Tugas Pembantuan	0
DANA LAINNYA	0

4.1.4. Dukungan Personil

Dukungan personal Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah 989 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk Guru ASN dan Guru Honorer di Kabupaten Konawe Kepulauan. Adapun rinciannya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 : Rincian dukungan Personil Bidang Urusan Pendidikan

No	BidangTugas	Eselon/Fungsional			Jumlah
		I	II	III	
1	Kepala Dinas		I		1
2	Sekretaris			I	1
3	Ka.B.Paud			I	1
4	Ka.B.Dikdas			I	1
5	Ka.B.Kebudayaan			I	1
6	Ka Seksi				3
7	Kaubag Tata Usaha				1
8	Staf ASN				5
9	Pengawas				4
10	Guru ASN				743
11	Guru Honda				213
12	PHL Kantor				15
	JUMLAH				989 Orang

4.1.5. Hasil Pencapaian.

Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 4.4 : Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)		TARGET PERSENTASE (%)	
		TARGET	HASIL	TARGET	HASIL
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	2.409	2.367	100	98,26
2	Layanan Pendidikan Dasar	7404	5660	100	76,41
3	Layanan Pendidikan Kesetaraan	8808	783	100	8,89

Adapun capaian layanan Dasar dan layanan Mutu Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini



Tabel 4.5 : Capaian SPM Bidang Layanan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MUDA			63.28 %
01.00	Pendidikan Anak Usia Dini					91.50 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.61 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2409	2367	42	98.26 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.89 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	64.45 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	2409	2367	42	98.26 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	2367	2367	0	100.00 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	60	57	3	95.00 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	167	151	16	90.42 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0	0	0	100.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	167	7	160	4.19 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	167	151	16	90.42 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	167	2	165	1.20 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	167	1	166	0.60 %
02.00	Pendidikan Dasar					76.55 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	61.13 %



			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7407	5660	1747	76.41 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.42 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	77.11 %
	SD					79.11 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	7407	5660	1747	76.41 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	5660	5660	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	8	06.44	01.56	80.50 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	8	06.18	0,098611111	77.25 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	6	03.22	0,1375	53.67 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	6	03.09	0,146527778	51.50 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	100	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	100	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	100	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	460	410	50	89.13 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	460	460	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50	49	1	98.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	50	1	49	2.00 %
	SMP					75.11 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	7407	1901	5506	25.66 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	1901	1901	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	8	06.44	01.56	80.50 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	8	06.18	0,098611111	77.25 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	6	03.22	0,1375	53.67 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	6	03.09	0,146527778	51.50 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	100	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	100	0	100.00 %



	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	100	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	283	233	50	82.33 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	233	233	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	18	18	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	18	1	17	5.56 %
03.00	Pendidikan Kesetaraan					21.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	7.11 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8809	783	8026	8.89 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.67 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	73.36 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	8809	783	8026	8.89 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	783	783	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	8	06.44	01.56	80.50 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	8	06.18	0,098611111	77.25 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	6	03.22	0,1375	53.67 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	6	03.09	0,146527778	51.50 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	100	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	100	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	100	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50	25	25	50.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	50	25	25	50.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	11	9	2	81.82 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.0



4.1.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi.

Adapun permasalahan terkait pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut

Tabel 4.6 : Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan

NO	TAHAPAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Menunggu update data terbaru dari data dapodik melalui operator dapodik sekolah, dan menunggu hasil singkronisasi data dapodik	Mengupayakan update data dapodik lebih cepat
2	Perhitungan Kebutuhan	Seringnya keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang berbeda daripada yang direncanakan	Memastikan setiap perencanaan sesuai dengan Indikator SPM
3	Perencanaan Dan Penganggaran	anggaran yang dibuat Belum sepenuhnya sesuai dengan SPM Dinas Pendidikan dan kebudayaan sehingga penaksiran perencanaan anggaran yang dipakai belum tepat dengan keadaan sebenarnya.	Memastikan setiap program SPM dapat dianggarkan secara maksimal
4	Pelaksanaan	Terkadang program belum sepenuhnya sesuai dengan Indikator Layanan SPM	Memastikan setiap program Dinas Pendidikan sesuai dengan Indikator Layanan SPM
5	Lain - Lain	Belum meratanya akses dan masih rendahnya kualitas SDM Serta Khusus Pada Bidang PAUD Ketersediaan PAUD Belum merata di setiap Desa	Melaksanakan bimbingan teknis untuk pengelola PAUD dan pengelola sekolah kesetaraan



4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Layanan

Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 terdiri atas dua belas layanan yaitu :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan diabetes melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberklosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.2.2. Target Pencapaian

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Sebagai Berikut :

Tabel 4.7 : Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)	TARGET PERSENTASE (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	416	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	416	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	432	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	3306	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	5821	100
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	22.894	100
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	2.301	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.721	100
9	Pelayanan Kesehatan diabetes melitus	949	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	53	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberklosis	650	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	619	100



4.2.3. Anggaran

Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.313.536.740. Adapun Sumber anggaran tersebut di jelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 : Rincian Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KONAWE KEPULAUAN	706,370,894,989
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	0
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	2,313,536,740
	APBD	2,313,536,740
	A. APBD Murni	0
	B. APBD DAU	1,060,352,240
	C. APBD Dak Fisik	0
	D. APBD DAK Non Fisik	1,253,184,500
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-Dekonsentrasi	0
	C. APBN-Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

4.2.4. Dukungan Personil

Dukungan personal dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah sebanyak 34 Orang.

Tabel 4.9 : Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Bidang Tugas	Eselon/Fungsional			Jumlah
		I	II	III	
1	Kepala Dinas				1
2	Sekretaris				1
3	Kepala Bidang				3
4	Kepala sub bagian				3
5	JF Fungsional				16
6	JP analis				10
	JUMLAH				34 Orang



4.2.5. Hasil Capaian

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 : Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (ORANG)		TARGET PERSENTASE (%)	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	416	376	100	90,38
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	416	364	100	87,50
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	432	400	100	92,59
4	Pelayanan Kesehatan Balita	3306	2277	100	68,87
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	5821	5350	100	91,91
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	22.894	16.756	100	73,19
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	2.301	2151	100	93,48
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.721	2.566	100	94,30
9	Pelayanan Kesehatan diabetes melitus	949	884	100	93,15
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	53	53	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberklosis	650	621	100	95,54
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	619	4	100	0,65



Adapun capaian layanan Dasar dan layanan Mutu Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 di tunjukan pada tabel di bawah ini

Tabel 4.11 : Capaian Layanan Dasar dan Layanan Mutu SPM Bidang Urusan Kesehatan.

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-3	-4	-5		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			81.04 %	
01.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						87.66 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.31 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	416	376	40	90.38 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.36 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	76.78 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	52	47	5	90.38 %	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	37440	3600	33840	9.62 %	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	416	376	40	90.38 %	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	416	376	40	90.38 %	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	416	376	40	90.38 %	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	62	55	7	88.71 %	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	416	376	40	90.38 %	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	416	376	40	90.38 %	
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	416	376	40	90.38 %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	11 . Gel USG	Botol	28	9	19	32.14 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-3	-4	-5		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	(untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)						
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	20	10	10	50.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	192	161	31	83.85 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	192	188	4	97.92 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	45	28	17	62.22 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	416	376	40	90.38 %	
02.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						85.87 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	416	364	52	87.50 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.87 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	79.36 %	
	1 . Formulir partografi	Formulir	416	364	52	87.50 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	416	364	52	87.50 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	416	364	52	87.50 %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-3	-4	-5		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	20	10	10	50.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	192	188	4	97.92 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	192	161	31	83.85 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	45	28	17	62.22 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %	
03.00	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						90.72 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.07 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	432	400	32	92.59 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.65 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.25 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	432	400	32	92.59 %	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	432	400	32	92.59 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	432	400	32	92.59 %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	432	400	32	92.59 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	432	400	32	92.59 %	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	432	400	32	92.59 %	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	20	10	10	50.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	192	188	4	97.92 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	192	166	26	86.46 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	45	28	17	62.22 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-3	-4	-5		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	18	10	8	55.56 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	96	96	0	100.00 %	
04.00	Pelayanan Kesehatan Balita						70.46 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.10 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3306	2277	1029	68.87 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.36 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	76.80 %	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	3306	2277	1029	68.87 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	3306	2277	1029	68.87 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	3306	2277	1029	68.87 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	3306	2277	1029	68.87 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	3306	2277	1029	68.87 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	3306	2277	1029	68.87 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	3306	2277	1029	68.87 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	3306	2277	1029	68.87 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	3306	2277	1029	68.87 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	3306	2277	1029	68.87 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	3306	2277	1029	68.87 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	3306	2277	1029	68.87 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	3306	2277	1029	68.87 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	45	35	10	77.78 %	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	9	9	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	9	9	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	192	188	4	97.92 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	192	161	31	83.85 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-3	-4	-5		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	45	45	0	100.00 %	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	96	96	0	100.00 %	
05.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						91.89 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.53 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5821	5350	471	91.91 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.36 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.79 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	5821	5350	471	91.91 %	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	9	9	0	100.00 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	5821	5350	471	91.91 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	9	9	0	100.00 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)						



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	1065	1065	0	100.00 %	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	9	9	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	1065	1065	0	100.00 %	
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	1920	1920	0	100.00 %	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	18	12	6	66.67 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	192	188	4	97.92 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	192	161	31	83.85 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	45	28	17	62.22 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	45	45	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	96	96	0	100.00 %	
06.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						73.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	58.55 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3					
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	22894	16756	6138	73.19 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.16 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	75.82 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	9	9	0	100.00 %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	9	9	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	9	9	0	100.00 %	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	9	9	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	22894	16756	6138	73.19 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	18	5	13	27.78 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	22894	0	22894	0.00 %	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	9	0	9	0.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	22894	0	22894	0.00 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	100.00 %	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	9	9	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	22984	22986	-2	100.00 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	9	9	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	192	188	4	97.92 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	192	161	31	83.85 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	41	41	0	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	96	96	0	100.00 %	
07.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						92.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.78 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2301	2151	150	93.48 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.31 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	86.54 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	9	9	0	100.00 %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	9	9	0	100.00 %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	9	9	0	100.00 %	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	9	9	0	100.00 %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	2302	2151	151	93.44 %	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	2302	9	2293	0.39 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	9	9	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	192	188	4	97.92 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	192	162	30	84.38 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	41	4	91.11 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	96	96	0	100.00 %	
08.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						92.82 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.44 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2721	2566	155	94.30 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.38 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	86.90 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	2721	2566	155	94.30 %	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	9	9	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	9	9	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	9	9	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	192	188	4	97.92 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	192	161	31	83.85 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	18	10	8	55.56 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	45	28	17	62.22 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	41	4	91.11 %	
09.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						90.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.52 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	949	884	65	93.15 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.33 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	81.65 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian	AKSI
			-3	-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	949	884	65	93.15 %		
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	9	0	9	0.00 %		
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	949	884	65	93.15 %		
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	9	9	0	100.00 %		
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	9	9	0	100.00 %		
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	9	9	0	100.00 %		
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	192	188	4	97.92 %		
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	18	18	0	100.00 %		
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	45	28	17	62.22 %		
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	41	4	91.11 %		
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	26	19	57.78 %		
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	45	38	7	84.44 %		
10.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat							91.11 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	53	71	-18	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					11.11 %		



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	55.56 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	9	0	9	0.00 %	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	9	0	9	0.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	53	71	-18	100.00 %	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	53	71	-18	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	9	9	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	9	9	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	18	9	9	50.00 %	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	18	9	9	50.00 %	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	9	0	9	0.00 %	
11.00	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					93.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.43 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	650	621	29	95.54 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.24 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	86.18 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	9	9	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	650	621	29	95.54 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	650	621	29	95.54 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	650	621	29	95.54 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	9	9	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	9	9	0	100.00 %	
	8 . Tuberkulin	Vial	650	621	29	95.54 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	18	10	8	55.56 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	192	161	31	83.85 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	45	28	17	62.22 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	41	4	91.11 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	45	38	7	84.44 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	3	1	2	33.33 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	96	96	0	100.00 %	
12.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						12.62 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0.52 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	619	4	615	0.65 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.10 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	60.51 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	619	4	615	0.65 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	619	4	615	0.65 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	619	4	615	0.65 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	24	11	13	45.83 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	192	188	4	97.92 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	192	161	31	83.85 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	45	38	7	84.44 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	45	41	4	91.11 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0	100.00 %	



4.2.6. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12 : Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
-1	-2	-3
1	PENGUMPULAN DATA Silahkan Diisi Kendala / Masalah	
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN Belum ada workshop/bimtek khusus tentang penghitungan kebutuhan indikator SPM	Melaksanakan workshop/bimtek tentang penghitungan kebutuhan indikator SPM
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Penyusunan perencanaan SPM tidak dilakukan secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektor sehingga menyebabkan beberapa program yang harusnya menjadi standar dalam pemberian layanan SPM justru tidak bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.	Memadukan program lintas sektor sehingga program kegiatan yang menjadi standar dalam pemberian layanan SPM bisa terprogram dengan baik.
4	PELAKSANAAN Ketersediaan logistik yang belum memenuhi jumlahnya berdasarkan standar yang berlaku. Kemudian ditambah lagi beberapa alat kesehatan dan sarana prasarana baru dalam penerapan SPM mengakibatkan makin menurunnya capaian mutu SPM	Menambah jumlah logistik sesuai dengan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan membangun sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.



4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.1. Jenis Layanan

Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi dua urusan yakni :

- Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan Pengolahan air limbah domestik

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 4.13 : Target SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (ORANG)	TARGET PERSENTASE (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	11.080	100
2	Penyediaan Pengolahan air limbah domestik	318	100

4.3.3. Anggaran

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 17,358,103,500 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.14 : Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KONAWE KEPULAUAN	706,370,894,989
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	73,742,940,100
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	17,358,103,500
	APBD	17,358,103,500
	A. APBD Murni	0
	B. APBD DAU	3,943,368,000
	C. APBD DAK Fisik	13,414,735,500
	D. APBD DAK Non Fisik	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-Dekonsentrasi	0
	C. APBN-Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0



4.3.4. Dukungan Personil

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan telah dibagi sebanyak 58 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15 : Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

No	BidangTugas	Eselon			Staf	Jumlah
		II	III	IV		
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat		1	2	5	8
3	Bidang Cipta Karya		1	1	9	11
4	Bidang Bina Marga		1	3	9	13
5	Bidang Sumber Daya Air		1	2	10	13
6	Bidang Tata Ruang		1	1	5	7
7	UPTD SPAM			2	1	3
8	UPTD Peralatan dan Laboratorium			2	0	2
Jumlah						58

4.3.5. Hasil Capaian

Hasil Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 di tunjukan tabel dibawah ini :

Tabel 4.16 : Hasil Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang.

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)		TARGET PERSENTASE (%)	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	11.080	10.660	100	96,21
2	Penyediaan Pengolahan air limbah domestik	318	318	100	100

Adapun capaian layanan Dasar dan layanan Mutu Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 di tunjukan pada tabel di bawah ini



Tabel 4.17 : Capaian Layanan dasar dan Layanan Mutu SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					93.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.97 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11080	10660	420	96.21 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.25 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	81.27 %
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	11080	10660	420	96.21 %
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	11080	3198	7882	28.86 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-3	-4	-5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwana, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	318	318	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	318	318	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3				-7
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	318	318	0	100.00 %
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	318	318	0	100.0



4.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi.

Adapun permasalahan terkait pencapaian dan penerapan dan pencapaian target penyediaan pelayanan pengolahan air limbah antara lain sebagai berikut

Tabel 4.18 : Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan PU-TR

No	PERMSALAHAN	SOLUSI
-1	-2	-3
1	PENGUMPULAN DATA	
	Pemilik Dokumen tidak berdomisili pada lokasi setempat sehingga sulit teridentifikasi	Memastikan masyarakat yang terlayani sesuai dengan dokumen domisili yang di peroleh.
	Penerima Manfaat Belum Mengurus Dokumen Data Diri Seperti KTP Dan KK	Menyampaikan kepada masyarakat untuk segera mengurus data diri pada Dinas Terkait
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Untuk Tahun Anggaran 2024 sementara dilakukan updating data SPM	Memastikan Program kerja sesuai dengan Indikator Layanan SPM
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Keterbatasan sumber dana APBD DAU untuk pemenuhan kebutuhan SPM	Mencari sumber anggaran lain yang tidak mengikat sehingga dengan demikian penerima layanan SPM Mendapatkan layanan maksimal
4	LAIN - LAIN	
	Belum Adanya Pengolahan Lebih Lanjut Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Khususnya Bidang Sanitasi Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Belum Tersedia Dan Sanitasi Air Limbah Instalasi Pengolahan Lumpr Tinja (IPLT) Juga Belum Tersedia	Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang Pengelolaan sampah sehingga Program Instalasi Pengelolaan Lumpur tinja bisa dilaksanakan

4.4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

4.4.1. Jenis Layanan

Jenis layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 terdiri atas dua yaitu:

- Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2. Target Pencapaian

Taregt pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :



Tabel 4.19 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan pemukiman.

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)	TARGET PERSENTASE (%)
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40	100

4.4.3. Anggaran

Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 596.087.120 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.20: Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

PENDANAAN	PAGU
APBD KAB. KONAWE KEPULAUAN	
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Perumahan)	
Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Perangkat Daerah	596.087.120
APBD	0
A. APBD Murni	596.087.120
B. APBD DAU	0
C. APBD DAK Fisik	0
D. APBD DAK Non Fisik	0
E. DANA BAGI HASIL	0
F. Kerjasama	0
G. Otonomi Khusus	0
NON APBD	0
A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
APBN	0
B. APBN-Dekonsentrasi	0
C. APBN-Tugas Pembantuan	0
Dana Lainnya	0

4.4.4. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman keadaan tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 14 yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon tersendiri atas 8 orang dan 6 orang staf didukung oleh 33 orang tenaga honorer



Tabel 4.21 : Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Bidang Tugas	Eselon			Staf	Jumlah
		II	III	IV		
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat		1	1	3	5
3	Bidang Perumahan dan Permukiman		1	2	2	5
4	Bidang Pertanahan		1	1	1	3
Jumlah						14

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 : Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)		TARGET PERSENTASE (%)	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40	0	100	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40	40	100	100

Bidang urusan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan bidang urusan wajib Standar Pelayanan Minimal terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar, target pencapaian dan hasil capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Konawe Pepulauan pada tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 4.23 : Capaian Layanan Mutu dan Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00 %
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					0,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0,00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	40	0	40	0,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0,00 %
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		10	0	10	0,00 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		0	0	10	0,00 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana		0	0	10	0,00 %
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	0	10	0,00 %
	5 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen					
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0,00 %
Ada Relokasi Program Pemerintah (Ada/Tidak) Jika tidak ada Lampirkan Suket yang di tanda tangani oleh Sekda						



	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0,00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	40	40	40	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0,00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan		0	0	10	0,00 %
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0,00 %
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0,00 %
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	0,00 %
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni		10	0	10	0,00 %
	3 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	0,00 %



4.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi.

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran sebagai berikut.

Tabel 4. 24 : Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
-1	-2	-3
1	PENGUMPULAN DATA	
	Kekurangan Tenaga Teknis Di Lapangan, Sehingga Memperlambat Pengumpulan Data	Menambah tenaga teknis lapangan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Belum Memadai Data Lapanagan Untuk Menghitung Kebutuhan	Menghitung kembali kebutuhan lapangan sesuai dengan kebutuhan
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Minimnya Anggaran Dinas Perumahan	Mencari Sumber Dana lain yang tidak mengikat dan memastikan anggaran yang ada dianggarkan sesuai dengan program kegiatan SPM
4	PELAKSANAAN	
	Belum Adanya SK Korban Bencana	Memastikan pelayanan Korban bencana sesuai dengan tahapan Standar Pelayanan Minimal

4.5. Bidang Urusan Trantibumlinmas.

4.5.1. Jenis Layanan

Jenis layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan trantibumlinmas terdiri atas tiga kategori layanan yaitu Trantibum, Kebencanaan dan Damkar dengan jenis layanan sebagai berikut

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

4.5.2. Target Pencapaian

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.25 : Target Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)	TARGET PERSENTASE (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	15.093	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	280	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	575	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	11	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	15.093	100

4.5.3. Anggaran

Anggaran Trantibumlinmas dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5,520,179,260 dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang Trantibum dan Damkar sebesar Rp. 2.113.766.860 dengan skema pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4.26 : Anggaran SPM Bidang Urusan Trantibum dan Damkar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD Kab. Konawe Kepulauan	585.128.124.000
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Trantibumlinmas)	11.604.835.690
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Perangkat Daerah	2.113.766.860
	APBD	0
	A. APBD Murni	0
	B. APBD Dau	0
	C. APBD Dak Fisik	0
	D. APBD Dak Non Fisik	0
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (Csr)	0
	APBN	0
	B. APBN -Dekonsentrasi	0
	C. APBN -Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0



- b. Bidang Kebencanaan Sebesar Rp. 3.266.536.400 dengan skema pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4.27 : Anggaran SPM Bidang Urusan Kebencanaan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD Kab. Konawe Kepulauan	585.128.124.000
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Trantibumlinmas)	5.055.868.320
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Perangkat Daerah	3.266.536.400
	APBD	0
	A. APBD Murni	0
	B. APBD Dau	0
	C. APBD Dak Fisik	0
	D. APBD Dak Non Fisik	0
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	Non APBN	0
	A. Corporate Social Responsibility (Csr)	0
	APBN	0
	B. APBN -Dekonsentrasi	0
	C. APBN -Tugas Pembantuan	0

4.5.4. Dukungan Personil

- a. Dukungan personil Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibum dan Damkar Kabupaten Konawe Kepulauan Pada Tahun 2024 berjumlah 239 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.28 : Dukungan Personil Penarapan SPM Bidang Trantibum dan Damkar

Golongan		Jumlah Orang
Golongan IV	:	2 Orang
Golongan III	:	9 Orang
Golongan II	:	3 Orang
Golongan I	:	- Orang
PPPK	:	3 Orang
Pegawai Kontrak	:	222 Orang
Jumlah		239



- b. Dukungan Personil Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang urusan Kebencanaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 berjumlah 25 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.29 : Dukungan Personil Bidang Kebencanaan

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Kepala Pelaksana	Pembina Utama Madya, IV/c	1 Orang
Kepala Sekretariat	Penata Tk. I /Gol. III d	1 Orang
Kepala Bidang	Pembina, IV/a	1 Orang
	Penata Tk. I /Gol. III d	2 Orang
Staf	Penata Muda /Gol. III a	1 Orang
Tenagan Teknis	TRC dan Motoris	19 Orang
Jumlah		25 rang

4.5.5. Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30 : Hasil Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN		TARGET PERSENTASE (%)	
		TARGET (ORANG)	CAPAIAN (ORANG)	TARGET	CAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	15.093	13.172	100	87.27
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	280	280	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	575	305	100	53,04
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	11	11	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	15.093	13.172	100	87.27



Tabel 4.31 : Capaian Layanan Dasar dan Layanan Mutu SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian		
			-1	-2	-3	-4	-5	-6
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS MADYA					84.60 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)							84.60 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	69.82 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15.093	13.172	1921	87.27 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	14.79 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					73.93 %		
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	430	110	320	25.58 %		
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	5	5	0	100.00 %		
	Data Dukung : 7412-20250107082023(1) SOP Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada.pdf Status : Approved							



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output				Total Pencapaian
			-3	-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	250	45	205	18.00 %	
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %	
	Data Dukung : 7412-20250107082157(2) Standar Pelayanan.pdf Status : Approved						
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						82.51 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)						90.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%		80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			-3	-4	-5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	280	280	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	10.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	0.00 %
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	29257	0	29257	0.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana <small>(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)</small>	Orang	280	280	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	15	15	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					57.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	42.43 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	575	305	270	53.04 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.09 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.45 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana <small>(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)</small>	Unit	25	25	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) <small>(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)</small>	Orang	550	280	270	50.91 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11	11	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana <small>(terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam persiapan petugas penanganan darurat bencana)</small>	Posko	5	5	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana <small>(persediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)</small>	Orang	143	143	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana <small>(persediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)</small>	Dokumen	14	14	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			-3	-4	-5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	14	14	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					87.47 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					87.47 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	69.82 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15093	13172	1921	87.27 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	17.65 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					88.25 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	15	15	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	2	2	0	100.00 %
	Data Dukung : 7412-20250107081924(3) Prosedur Penanganan Kebakaran.pdf Status : Approved					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	200	109	91	54.50 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			-3	-4	-5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
	4 . Kapasitas aparat pemandam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparat SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemandam I)	Orang	40	30	10	75.00 %
	5 . Pelayanan pemandaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	100.00 %



4.5.6. Permaslahan dan Solusi

a. Urusan Satpol PP dan Damkar

Permasalahan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Satpol PP dan Damkar adalah :

Tabel 4.32 : Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibum, dan Damkar

No	PERMASALAHAN	PERMASALAHAN
	1	2
1	PENGUMPULAN DATA	
	kurangnya dokumentasi pelaksanaan penegakan perda sehingga data masyarakat yang mengalami kerugian akibat penegakan perda perkada tidak dapat disuguhkan secara akurat dan hanya bersifat estimasi	Membentuk Tim Media Dokumentasi sehingga setiap kejadian penegakan perda bisa disajikan dengan jelas
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	kurangnya pemahaman mengenai perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	Melaksanakan Bimtek Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penerapan spm masih belum dianggarkan	Menganggarkan setiap sub kegiatan yang mendukung kegiatan SPM
4	PELAKSANAAN	
	sarana dan prasarana fasilitas penunjang kerja masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan sehingga hasil kinerja lebih optimal	Meningkatkan fasilitas sarana dan Prasarana penunjang Penerapan SPM
	kurangnya jumlah personil menjadi salah satu hambatan dalam penegakan perda, kekurangan disebabkan karena mutasi PNS ke SKPD lain, pemutusan kontrak kerja dan pengunduran diri	Meningkatkan jumlah personil penegakan Perda dengan berkoordinasi dengan pihak terkait
5	LAIN - LAIN	
	kurangnya koordinasi antara bidang penegakan peraturan perundang-undangan dengan bagian hukum terkait perda yang memuat sanksi terhadap pelanggarnya.	Meningkatkan koordinasi antar bidang penegakan perda perundang-undangan dengan bagian hukum



b. Urusan BPBD

Permasalahan Penerapan SPM Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah :

1. Tingginya angka daerah Rawan Bencana yang Tidak didukung anggaran yang Memadai untuk melaksanakan pelayanan Penaggulangan Bencana Yang Menyeluruh Kepada Masyarakat yang berada dilokasi rawan Bencana.
2. Kurangnya Personil yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk Melaksanakan pelayanan Penaggulangan Bencana Yang Menyeluruh Kepada Masyarakat yang berada dilokasi rawan Bencana.

Solusi

1. Melaksanakan Kegiatan Dengan Menggunakan Skala Prioritas karna Menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan BPBD
2. Melaksanakan Pelatihan Kepada Petugas Penaggulangan Bencana.

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Layanan

Jenis layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 terdiri atas lima layanan yaitu

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian

Target pencapaian Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.33 : Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)	TARGET PERSENTASE (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	133	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	2	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	50	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	0	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7	100

4.6.3. Anggaran

Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang urusan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 310.420.400 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.34 : Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial

No	Pendanaan	Pagu
1	Apbd Kab. Konawe Kepulauan	-
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	2.762.923.232
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	310.420.400
	APBD	-
A.	APBD Murni	-
B.	APBD DAU	-
C.	DAU Sg Pendidikan	200.000.000
C.	APBD Dak Fisik	-
D.	APBD Dak Non Fisik	-
E.	Dana Bagi Hasil	45.000.000
F.	Kerjasama	-
G.	Otonomi Khusus	-
H.	Silpa	500.000.000
	Non APBD	-
A.	Corporate Social Responsibility (Csr)	-
	APBN	-
A.	Apbn-Dekonsentrasi	-
B.	Apbn-Tugas Pembantuan	-
	Dana Lainnya	-
	A. Buffer Stock Kementerian Sosial Ri	65.420.400



4.6.4. Dukungan Personil

Dukungan Personil mengambarkan jumlah personal atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS : 7 Orang
- b. Non-PNS : 90 Orang

4.6.5. Hasil Capaian

Hasil Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35 : Hasil Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial

NO	JENIS LAYANAN	TARGET PENCAPAIAN (Orang)		TARGET PERSENTASE (%)	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	133	133	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	2	2	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	50	40	100	80
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	0	0	0	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7	7	100	100

Capaian layanan mutu dan capaian layanan dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan di gambarkan dalam tabel berikut :



Tabel 4.36 : Capaian Layanan Dasar dan Layanan Mutu SPM Bidang Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
			-2	-3	-4		
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				TUNTAS UTAMA		92.94 %
01.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti						97.69 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	133		133	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						17.69 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Satuan		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	88.46 %
	1 . Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	Orang	22	22	0		100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	2	2	0		100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	2	1	1		50.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	2	0		100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0		100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-2	-3	-4	
-1	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	20	20	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	2	2	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	6	6	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	20	20	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
02.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					93.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-2	-3	-4	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2	2	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.33 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	66.67 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	2	2	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	0	0	0	0.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	2	2	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perlengkapan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsiannya sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	2	2	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	2	2	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-2	-3	-4	
-1	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	0	0.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0	0.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	0	100.00 %
03.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					81.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	40	10	80.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.85 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	89.23 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	50	40	10	80.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7
	layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	50	30	20	60.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	50	30	20	60.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	50	30	20	60.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	50	50	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsiannya sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	50	50	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	50	50	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-2	-3	-4	
-1	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
04.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					91.82 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Upload Surat Keterangan Tidak Ada Rehabilitasi Sosial Download Dokumen yang telah di upload 7412-20250120040830SURAT PERNYATAAN SPM FIKS signed signed.pdf Dokumen Sudah Di Setujui					
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					11.82 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM + Suket 25 %		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	59.09 %
05.00	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7	7	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian		
			-2	-3	-4			
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %		
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	7	7	0	100.00 %		
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7	7	0	100.00 %		
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	1	1	0	100.00 %		
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	3	3	0	100.00 %		
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	7	7	0	100.00 %		



4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah

Tabel 4.37 : Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
-1	-2	3
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Kurangnya Laporan dan partisipasi Masyarakat dalam melaporkan permasalahan dan Minimnya Anggaran dalam penanganan SPM menjadi salah satu faktor terhambatnya pengumpulan data	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan setiap kejadian bencana pada pihak terkait.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Ketidak sesuaian antara perhitungan kebutuhan anggaran dengan realisasi yang diberikan	menghitung kembali anggaran sesuai dengan layanan SPM
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Minimnya anggaran yang diberikan dibandingkan dengan kebutuhan anggaran dalam perencanaan	Mengkoordinasikan dengan pihak terkait sehingga layanan SPM Benar-benar diperoleh masyarakat secara maksimal.
4.	PELAKSANAAN	
	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan karena beberapa sub kegiatan tidak mendapat penganggaran yang memadai	Mengkoordinasikan dengan pihak terkait sehingga layanan SPM Benar-benar diperoleh masyarakat secara maksimal.
5.	LAIN - LAIN	
	Menjadi bahan pertimbangan untuk penambahan anggaran, mengingat Dinas Sosial merupakan OPD dengan tugas wajib pelayanan dasar	Mengkoordinasikan dengan pihak terkait sehingga layanan SPM Benar-benar diperoleh masyarakat secara maksimal.



4.7. Program Dan Kegiatan

4.7.1. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan.

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran bidang urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.38 : Program dan kegiatan serta realisasi anggaran bidang urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
		KAB. KONAWE KEPULAUAN			40,458,235,270	31,655,286,935	78.24 %		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					40,458,235,270	31,655,286,935		
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			20,766,941,075	15,542,471,075	74.84 %		
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%		
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	245,795,000	245,795,000	100.00 %		
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	540,459,001	540,459,001	100.00 %		
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%		
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4,219,744,999	4,219,744,999	100.00 %		
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%		
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%		
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%		
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	153,908,000	153,908,000	100.00 %		
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%		
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	399,279,335	399,279,335	100.00 %		
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%		
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	200,000,000	199,350,000	99.68 %		
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	622,480,000	0	0%		
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	0	0	0%		
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	2,002,000,000	2,002,000,000	100.00 %		
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	651,926,600	651,926,600	100.00 %		
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	720,000,000	720,000,000	100.00 %		



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	740,665,800	740,665,800	100.00 %
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,302,185,620	1,302,185,620	100.00 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	4,601,340,000	0	0%
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	593,182,640	593,182,640	100.00 %
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	556,442,080	556,442,080	100.00 %
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	491,590,000	491,590,000	100.00 %
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2,725,942,000	2,725,942,000	100.00 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
	JUMLAH INDIKATOR				20,766,941,075	15,542,471,075	74.84 %	
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				13,896,840,695	11,175,940,360	80.42 %
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0	0%	
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,101,000,000	1,101,000,000	1,101,000,000	100.00 %	
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	657,000,000	657,000,000	657,000,000	100.00 %	
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0	0%	
	5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	339,000,000	339,000,000	339,000,000	100.00 %	
	6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0	0%	
	7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0	0%	
	8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0	0%	
	9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0	0%	
	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0	0%	
	11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2,231,133,000	2,231,133,000	2,231,133,000	100.00 %	
	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0	0%	
	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0	0%	
	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0	0%	
	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	178,000,000	178,000,000	178,000,000	100.00 %	
	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0	0%	
	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0	0%	
	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0	0%	
	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0	0%	
	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,269,560,000	1,269,560,000	1,269,560,000	100.00 %	
	21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	399,279,335	0	0	0%	
	22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0	0%	
	23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	200,000,000	199,200,000	199,200,000	99.60 %	
	24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	468,360,000	0	0	0%	
	25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	0	0	0	0%	
	26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0	0%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1,070,000,000	618,650,000	57.82 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	0	0	0%
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	630,000,000	177,750,000	28.21 %
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	586,803,500	0	0%
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	903,188,080	903,188,080	100.00 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	2,325,700,000	2,325,700,000	100.00 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	482,297,640	482,297,640	100.00 %
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	285,784,140	285,784,140	100.00 %
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	249,735,000	249,735,000	100.00 %
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	520,000,000	157,942,500	30.37 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					13,896,840,695	11,175,940,360	80.42 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			4,272,499,000	3,623,535,500	84.81 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	260,233,000	260,233,000	100.00 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	0	0	0%
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0%
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	0	0	0%
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0%
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	614,991,000	614,991,000	100.00 %
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	402,571,500	402,571,500	100.00 %
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	822,000,000	366,000,000	44.53 %
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	135,104,500	0	0%
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	522,295,500	464,436,500	88.92 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1,328,670,000	1,328,670,000	100.00 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	186,633,500	186,633,500	100.00 %
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,272,499,000	3,623,535,500	84.81 %
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1,521,954,500	1,313,340,000	86.29 %
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0%
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	0	0	0%
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	208,614,500	0	0%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	656,670,000	656,670,000	100.00 %
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	656,670,000	656,670,000	100.00 %
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					1,521,954,500	1,313,340,000	86.29 %
JUMLAH PROGRAM					40,458,235,270	31,655,286,935	78.24 %

4.7.2. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan.

Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran bidang urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.39 : Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran bidang urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. KONAWE KEPULAUAN				2,313,536,740	2,202,355,500	95.19 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2,313,536,740	2,202,355,500	95.19 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2,313,536,740	2,202,355,500	95.19 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	347,760,000	332,100,000	95.50 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	196,807,500	191,357,500	97.23 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	91,660,000	64,167,000	70.01 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	101,780,000	96,410,000	94.72 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	631,560,000	609,040,000	96.43 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	67,110,000	67,060,000	99.93 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	199,966,000	199,916,000	99.97 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	44,740,000	44,115,000	98.60 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	55,900,240	55,240,000	98.82 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	197,695,000	196,245,000	99.27 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	227,168,000	195,865,000	86.22 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	151,390,000	150,840,000	99.64 %
	JUMLAH INDIKATOR				2,313,536,740	2,202,355,500	95.19 %
	JUMLAH PROGRAM				2,313,536,740	2,202,355,500	95.19 %

4.7.3. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Tabel 4.40 : Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. KONAWE KEPULAUAN				17,358,103,500	16,594,316,343	95.60 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				12,652,668,000	11,899,120,843	94.04 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			12,652,668,000	11,899,120,843	94.04 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	8,795,850,000	8,055,260,036	91.58 %
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	2,188,650,000	2,178,750,000	99.55 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1,668,168,000	1,665,110,807	99.82 %
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				12,652,668,000	11,899,120,843	94.04 %
	JUMLAH PROGRAM				12,652,668,000	11,899,120,843	94.04 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4,705,435,500	4,695,195,500	99.78 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			4,705,435,500	4,695,195,500	99.78 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	4,705,435,500	4,695,195,500	99.78 %
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					4,705,435,500	4,695,195,500	99.78 %
JUMLAH PROGRAM					4,705,435,500	4,695,195,500	99.78 %

4.7.4. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Perumahan

Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran bidang urusan perumahan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.41 : Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran bidang urusan perumahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. KONAWE KEPULAUAN				596,087,120	583,280,360	97.85 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				96,087,120	83,891,360	87.31 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			96,087,120	83,891,360	87.31 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	48,502,360	39,067,360	80.55 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	47,584,760	44,824,000	94.20 %
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				96,087,120	83,891,360	87.31 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0	0	0.00 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %
JUMLAH PROGRAM					96,087,120	83,891,360	87.31 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	01.00	Master Plan, DED dan RAB Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu			500,000,000	499,389,000	99.88

4.7.5. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Trantibumlinmas

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran bidang urusan trantibumlinmas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.42 : Program dan kegiatan serta realisasi anggaran bidang urusan trantibumlinmas

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. KONAWE KEPULAUAN				5,520,179,260	5,302,691,089	96.06 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				913,131,700	734,489,000	80.44 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			516,610,700	505,444,000	97.84 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	42,416,700	31,250,000	73.67 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	49,850,000	49,850,000	100.00 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
		4	kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	45,500,000	45,500,000	100.00 %
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	182,200,000	182,200,000	100.00 %
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	196,644,000	196,644,000	100.00 %
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				516,610,700	505,444,000	97.84 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			256,645,000	229,045,000	89.25 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	40,580,000	40,580,000	100.00 %
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	111,690,000	84,090,000	75.29 %
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	104,375,000	104,375,000	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				256,645,000	229,045,000	89.25 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			139,876,000	0	0.00 %
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
		2	kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	139,876,000	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				139,876,000	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				913,131,700	734,489,000	80.44 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				3,266,536,400	3,229,374,219	98.86 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			80,000,000	79,796,000	99.75 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	80,000,000	79,796,000	99.75 %
	JUMLAH INDIKATOR				80,000,000	79,796,000	99.75 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			2,893,906,400	2,868,630,925	99.13 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	50,000,000	48,450,000	96.90 %
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	15,000,000	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2,653,246,400	2,651,155,925	99.92 %
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	40,000,000	34,200,000	85.50 %
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%		
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	35,000,000	34,275,000	97.93 %		
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%		
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	100,660,000	100,550,000	99.89 %		
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%		
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%		
JUMLAH INDIKATOR					2,893,906,400	2,868,630,925	99.13 %		
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50,050,000	42,875,000	85.66 %		
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas		Laporan	0	0	0%		
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%		
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		Orang	35,000,000	32,875,000	93.93 %		
	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%		
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota		Orang	0	0	0%		
	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		Orang	15,050,000	10,000,000	66.45 %		
	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit		Dokumen	0	0	0%		
	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		Laporan	0	0	0%		
JUMLAH INDIKATOR					50,050,000	42,875,000	85.66 %		
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				242,580,000	238,072,294	98.14 %		
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%		
	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%		
	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		Dokumen	187,580,000	187,072,294	99.73 %		
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Dokumen	20,000,000	18,225,000	91.13 %		
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana		Laporan	0	0	0%		
	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%		



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	35,000,000	32,775,000	93.64 %
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				242,580,000	238,072,294	98.14 %
	JUMLAH PROGRAM				3,266,536,400	3,229,374,219	98.86 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				1,340,511,160	1,338,827,870	99.87 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			404,241,080	404,210,230	99.99 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	48,390,000	48,390,000	100.00 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	47,827,450	47,827,450	100.00 %
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	49,475,000	49,450,000	99.95 %
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	47,843,780	47,843,780	100.00 %
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%		
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%		
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%		
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%		
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	210,704,850	210,699,000	100.00 %		
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%		
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%		
JUMLAH INDIKATOR					404,241,080	404,210,230	99.99 %		
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				0	0	0.00 %		
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran		Dokumen	0	0	0%		
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran		Dokumen	0	0	0%		
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %		
10	Investigasi Kejadian Kebakaran				0	0	0.00 %		
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran		Dokumen	0	0	0%		
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %		
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				874,683,280	873,030,840	99.81 %		
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat		Orang	463,354,280	462,674,680	99.85 %		
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		Desa	411,329,000	410,356,160	99.76 %		
	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana		Dokumen	0	0	0%		
JUMLAH INDIKATOR					874,683,280	873,030,840	99.81 %		
12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				61,586,800	61,586,800	100.00 %		
	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia		Laporan	0	0	0%		



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	61,586,800	61,586,800	100.00 %
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				61,586,800	61,586,800	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				1,340,511,160	1,338,827,870	99.87 %

4.7.6. Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial

Program Kegiatan dan realisasi anggaran bidang urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.43 : Program Kegiatan dan realisasi anggaran bidang urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. KONAWE KEPULAUAN				745,000,000	745,000,000	100.00 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				545,000,000	545,000,000	100.00 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			545,000,000	545,000,000	100.00 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	15,000,000	15,000,000	100.00 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	15,000,000	15,000,000	100.00 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	400,000,000	400,000,000	100.00 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	5,000,000	5,000,000	100.00 %
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	100,000,000	100,000,000	100.00 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%		
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%		
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%		
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	10,000,000	10,000,000	100.00 %		
JUMLAH INDIKATOR					545,000,000	545,000,000	100.00 %		
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				0	0	0.00 %		
	1	Penyediaan makanan		Orang	0	0	0%		
	2	Penyediaan sandang		Orang	0	0	0%		
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		Unit	0	0	0%		
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		Orang	0	0	0%		
	5	Pelayanan dukungan Psikososial		Orang	0	0	0%		
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %		
JUMLAH PROGRAM					545,000,000	545,000,000	100.00 %		
KEGIATAN LAINNYA									
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA								
		01.00	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		200,000,000	200,000,000	100.00 %		



BAB V P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 disusun berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA Tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah Tahun 2024 yang merupakan realisasi pemenuhan kewajiban Bupati Konawe Kepulauan selaku Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2024 dalam berbagai bidang urusan yang dijabarkan dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024. Berbagai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat diraih berkat adanya komitmen, kepedulian dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yaitu unsur Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ini disampaikan. Semoga evaluasi capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ini dapat mendorong perbaikan dan peningkatan program dan kegiatan untuk Masyarakat demi mewujudkan masyarakat Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif, dan Tanggunh) dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas.

Langara, 24 Maret 2025



LPPD
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2024 T.A 2025